

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN BRASIL PADA ERA JAIR
BOLSONARO (2019-2022) DAN LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
(2023-2025) DALAM KONTEKS *PARIS AGREEMENT*
DAN DEFORESTASI HUTAN AMAZON**

(Skripsi)

Oleh

Dwi Afriani

NPM 2216071063



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PERUBAHAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN BRASIL PADA ERA JAIR BOLSONARO (2019-2022) DAN LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (2023-2025) DALAM KONTEKS *PARIS AGREEMENT* DAN DEFORESTASI HUTAN AMAZON

Oleh

DWI AFRIANI

Brasil merupakan negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas iklim global. Dalam konteks *Paris Agreement*, kebijakan lingkungan Brasil mengalami perubahan yang signifikan antara pemerintahan Jair Bolsonaro dan Luiz Inácio Lula da Silva. Pada era Bolsonaro, kebijakan lingkungan Brasil mengarah pada pelemahan kapasitas kelembagaan, deregulasi, dan penurunan ambisi kebijakan iklim, yang berkontribusi pada laju deforestasi Hutan Amazon. Sementara itu, pada era Lula, kebijakan lingkungan mengarah pada penguatan kelembagaan, peningkatan ambisi kebijakan iklim, serta reaktivasi upaya pengendalian deforestasi yang berdampak pada penurunan deforestasi Hutan Amazon.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan lingkungan Brasil dalam dua periode pemerintahan serta dampaknya terhadap deforestasi Hutan Amazon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi dari sumber sekunder seperti laporan, literatur ilmiah, dan dokumen kebijakan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori *Foreign Policy Change* dari Charles F. Hermann (1990) dan konsep *Environmental Policy Integration* (EPI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan lingkungan Brasil dapat dikategorikan sebagai *problem/goal change* karena terjadi pergeseran tujuan kebijakan dari prioritas eksploitasi ekonomi menuju perlindungan lingkungan dan komitmen terhadap perubahan iklim. Selain itu, perubahan tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor domestik (*domestic restructuring*) yang memicu perubahan arah kebijakan pada tingkat nasional. Dengan demikian, arah kebijakan lingkungan memiliki kontribusi langsung terhadap dinamika deforestasi Hutan Amazon.

Kata Kunci: Kebijakan Lingkungan, Deforestasi, Brasil, *Paris Agreement*

ABSTRACT

ENVIRONMENTAL POLICY CHANGE IN BRAZIL UNDER THE ADMINISTRATIONS OF JAIR BOLSONARO (2019-2022) AND LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (2023-2025) IN THE CONTEXT OF THE PARIS AGREEMENT AND AMAZON DEFORESTATION

By

DWI AFRIANI

Brazil is home to the largest tropical rainforest in the world which plays a crucial role in maintaining global climate stability. In the context of the Paris Agreement, Brazil's environmental policy has undergone significant changes between the administrations of Jair Bolsonaro and Luiz Inácio Lula da Silva. During Bolsonaro's administration, environmental policy tended to weaken institutional capacity, promote deregulation, and reduce the ambition of climate policy, which contributed to the increasing rate of deforestation in the Amazon. In contrast, under Lula's administration, environmental policy has shifted toward strengthening institutional capacity, increasing climate policy ambition, and reactivating deforestation control measures, resulting in a decline in Amazon deforestation. This study aims to analyze the changes in Brazil's environmental policy across the two administrations and their impact on Amazon deforestation. The research employs a qualitative approach using a case study method, with data collected through document analysis of secondary sources such as reports, academic literature, and policy documents. The analysis is conducted using the Foreign Policy Change theory proposed by Charles F. Hermann (1990) and the concept of Environmental Policy Integration (EPI). The findings indicate that the changes in Brazil's environmental policy can be categorized as a *problem/goal change*, as there has been a shift in policy objectives from prioritizing economic exploitation to prioritizing environmental protection and climate commitments. Furthermore, these changes are influenced by domestic factors (*domestic restructuring*) that drive shifts in policy direction at the national level. Therefore, the direction of environmental policy has a direct contribution to the dynamics of deforestation in the Amazon Rainforest.

Keywords: Environmental Policy, Deforestation, Brazil, Paris Agreement

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN BRASIL PADA ERA JAIR
BOLSONARO (2019-2022) DAN LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (2023-
2025) DALAM KONTEKS *PARIS AGREEMENT* DAN DEFORESTASI
HUTAN AMAZON**

**Oleh:
DWIAFRANI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi

: PERUBAHAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN
BRASIL PADA ERA JAIR BOLSONARO (2019-
2022) DAN LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
DALAM KONTEKS *PARIS AGREEMENT* DAN
DEFORESTASI HUTAN AMAZON

Nama Mahasiswa

: **Dwi Afriani**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2216071063

Jurusan

: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

NIP. 197912302014041001

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Simon Sumanjowo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.


NIP. 198106282005011003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

Penguji Utama : Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Mei 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 2 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Dwi Afriani

NPM. 2216071063

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Dwi Afriani, dilahirkan di Lampung Tengah pada 10 April 2004. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Putri kedua dari



pasangan Bapak Slamet Riadi dan Ibu Mursini. Penulis memulai pendidikan formal di TK Darul Muttaqin, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah dasar di SD Negeri 2 Bulusari. Setelah itu, penulis menempuh pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 4 Gunung Sugih, dan melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Gunung Sugih.

Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi melalui jalur UTBK SBMPTN sebagai mahasiswa S1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Selama masa perkuliahan, penulis mengikuti berbagai kegiatan akademik dan non-akademik sebagai bentuk pengembangan diri dan menjangkau relasi di luar Program Studi Hubungan Internasional. Penulis ikut berpartisipasi dalam organisasi di dalam kampus, seperti UKM-F Republica dan Humas Unila. Di dalam maupun di luar kampus, penulis juga terlibat aktif dalam kegiatan sukarelawan, seminar, magang, kewirausahaan, dan kepanitiaan yang lebih banyak diposisikan dalam divisi Humas, PDD, dan sebagai liaison officer (LO). Pengalaman yang diperoleh semasa perkuliahan membentuk penulis menjadi individu yang tidak hanya memiliki dasar pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan interpersonal dan profesional dengan berbagai kalangan.

MOTTO

“Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.

(Q.S. Al-Baqarah: 216)

“One must imagine Sisyphus happy.”

(Albert Camus)

“Kita bukan satu-satunya pemilik Bumi; kita hanyalah penjaga untuk generasi setelah kita.”

(Dwi Afriani)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karya ilmiah ini penulis persembahkan sebagai bentuk syukur atas segala jalan, ketentuan, dan proses kehidupan yang telah Allah SWT izinkan untuk penulis lalui. Di tengah banyaknya keraguan, kelelahan, dan hal-hal yang tidak selalu dapat dipahami oleh manusia, penulis percaya bahwa setiap perjalanan selalu memiliki makna yang hanya dapat dimengerti ketika manusia memilih untuk tetap melangkah. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan bahwa manusia tidak selalu harus memahami seluruh jalan hidupnya untuk tetap berjalan dengan sabar dan penuh ikhtiar. Dengan penuh rasa hormat, kasih sayang, dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ilmiah berikut kepada:

Keluarga Besar Penulis dan Seluruh Pembaca.

SANWACANA

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat anugerah, rahmat, dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “*Perubahan Kebijakan Lingkungan Brasil pada Era Jair Bolsonaro (2019-2022) dan Luiz Inácio Lula da Silva (2023-2025) dalam Konteks Paris Agreement dan Deforestasi Hutan Amazon*” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Penulis sadar bahwa keberhasilan dibalik penyusunan skripsi ini tidak hanya dilakukan penulis semata, melainkan dibantu oleh segala doa, usaha, dan kasih sayang, serta ketulusan dari para pihak yang penulis sayang. Maka, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung;
3. Mba Tety Rachmawati, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa sabar, berbudi luhur, dan tenang, yang telah memberikan arahan, semangat, sekaligus doa-doa selama penulis memasuki program studi HI. Terima kasih untuk segala bimbingan yang diberikan kepada penulis dari masalah akademik, magang, hingga proses berlangsungnya penyusunan skripsi ini;
4. Abang Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Satu-satunya Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan arahan akademik selama masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi. Segala ilmu, nasihat, dan pengalaman yang diberikan akan selalu penulis ingat di masa depan hingga usia penulis selesai di dunia. Terima

kasih karena menjadi Dosen Pembimbing yang hangat, ramah, dan selalu memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi;

5. Mas Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan banyak bantuan, kemudahan, masukan, dan juga saran yang membangun agar skripsi penulis dapat lebih baik lagi;
6. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan waktu, ilmu, pengalaman, dan bantuannya kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung hingga proses penyusunan skripsi;
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Slamet Riadi dan Ibu Mursini. Terima kasih atas doa yang tidak pernah berhenti menyertai setiap langkah penulis, bahkan dalam waktu-waktu yang tidak selalu diketahui orang lain. Penulis menyadari bahwa ada banyak kekuatan yang lahir dari doa-doa malam, dari sujud panjang yang dipanjatkan, serta dari harapan yang terus dijaga di tengah proses yang tidak selalu mudah. Terima kasih karena telah menjadi tempat penulis kembali ketika dunia terasa sulit dan penuh tekanan. Atas segala kesabaran, pengorbanan, perhatian, dan kepercayaan yang terus diberikan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan perjalanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan, umur panjang, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu atas segala kebaikan yang telah diberikan.
8. Kakak perempuan yang paling penulis sayang, Mba Eka Fitriani dan Kak Surya Gustiawan. Terima kasih banyak atas segala bantuan dalam bentuk waktu, pengalaman, dan materi sejak penulis lahir hingga saat ini. Terima kasih karena kekuatan dan pengalaman yang diberikan dapat menjadi ilmu sekaligus bekal untuk penulis agar dapat menjalani kehidupan yang ikhlas dan kuat di masa depan. Kita akan tua dan kehilangan waktu seiring usia, maka dari itu, semoga segala hal baik terus menyertai. Semoga senantiasa panjang umur dan meraih kebahagiaan.
9. Untuk Sultan Azzam Gustiawan dan Prabu Rayandra Gustiawan. Terima kasih untuk oleh-oleh susu kacang kedelai dan makanan unik yang selalu diberikan kepada penulis sejak kalian beranjak balita. Terima kasih karena

sudah hadir ke dunia menjadi keponakan tersayang penulis. Semoga cita-cita kalian menjadi dokter dan *engineering* tercapai. Segala kasih penulis berikan kepada dua bocah yang saat ini masih berusia 6 dan 3 tahun. Semoga waktu biologis kalian panjang di dunia, memperoleh ketenangan hidup, kebahagiaan, dan rasa syukur tanpa batas.

10. Untuk seseorang yang kelak akan hadir dalam kehidupan penulis. Semoga, jika suatu hari dipertemukan, adalah seseorang yang mencintai Allah tanpa syarat, memiliki iman, kedalaman berpikir, ketenangan, ketulusan, dan integritas dalam menjalani hidup. Seseorang yang mampu memahami bahwa kehidupan tidak selalu mencari hal-hal yang sempurna, melainkan menjalaninya dengan tetap bertahan pada nilai, tanggung jawab, dan arah yang diyakini, bahkan ketika dunia sering berjalan tanpa kepastian serta dinamika moral yang tidak stabil. Dan semoga, ketika waktu itu tiba, kami dapat berjalan bersama sebagai dua manusia yang saling memahami, saling menghargai, dan berumur panjang hingga kakek nenek, sekaligus tetap tumbuh tanpa kehilangan diri masing-masing.
11. Kepada seluruh keluarga besar Kakek Buyut Marto Winangun, Kakek Mardi Wiyoko dari Sleman, Nenek Painem dari Lampung, Keluarga Kakek Mudakir dan Nenek Saji dari Pekalongan. Terima kasih atas segala doa, semangat, dan kasih sayang yang diberikan sejak penulis kecil hingga saat ini. Segala doa baik selalu penulis syukuri dan terima selama perjalanan panjang kehidupan.
12. Untuk Assabila Ameysya Damarna. Terima kasih karena sudah membalas pesan dari penulis melalui aplikasi online sejak menjadi Mahasiswa Baru pada 2022 silam, sehingga saat ini tetap menjadi sahabat yang hidup dalam frekuensi humor dan nilai hidup yang sama persis. Semoga kehidupan Assa selalu memihak dalam kebaikan, diberikan kesuksesan, dan memperoleh hasil dari doa-doa baik yang dipanjatkan.
13. Untuk Ayu Nadia Mahmudah, teman satu kelompok sejak menjadi Mahasiswa Baru yang kini menjadi sahabat baik penulis. Terima kasih untuk segala bantuan, kasih sayang, ketulusan, kebaikan, dan pengorbanan yang diberikan. Beruntung dapat bertemu dan menjadi sahabat bagi

seseorang yang baik dan penuh kehangatan seperti Ayu, semoga segala harapan baik dapat terwujud, semoga segala hal buruk tidak lagi hadir membuat Ayu bersedih. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan magang, kuliah, kos, kelompok, dan masih banyak lagi.

14. Untuk Dinda Putri Sandi dan pipoy. Terima kasih karena selalu mengingatkan penulis agar makan tepat waktu, mengingatkan penulis perihal hal-hal kecil yang kerap penulis lupakan: potongan kuku, sendok makan, piring atom, jus buah, dan segala sesuatu yang begitu menyentuh hati. Semoga persahabatan ini berlangsung langgeng hingga tua, semoga di kemudian hari kami dapat menjalani kehidupan sukses yang kami doakan. Sekali lagi, terima kasih sudah hadir secara tidak sengaja dalam proses perkuliahan dan menjadi sahabat yang baik.
15. Untuk sahabat tersayang: Anggi Permatasari dari SMP, Ana Listia Ningsih dan Lidiana Putri Yunita Sari yang telah menemani tiga tahun masa SMA penulis. Terima kasih untuk segala humor, obrolan, dan kenangan baik yang masih meninggalkan kesan untuk penulis hingga saat ini. Untuk Anggi, semangat menjalani perkuliahan, semoga memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Untuk Ana, semangat sekaligus selamat karena sudah menjadi ibu. Dan untuk Lidia, semoga segala hal baik datang menggantikan hal yang telah hilang sebelumnya.
16. Untuk Astritia Latifa wong Sekayu dan Sabrina Alyka Putri Setyo. Terima kasih sudah kebersamai penulis selama menjadi mahasiswi HI Unila hingga proses penyusunan skripsi. Terima kasih juga karena telah senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, dan ketulusan yang tidak ternilai. Semoga kehidupan kalian selalu diliputi ketenangan dan keberhasilan.
17. Untuk Ayu Puspitasari, Anisa Shafira as Saca, Rahmanda Isnaina Hanum, Mutiara Ramadhian Intani, I Made Surya Adi Pratama, Zeva Dini Imtiyaz, Keysya Salsabilla Romeins, Najwa Angel, Syafira Raissa Rahman, Siti Nurkholiza, Afiyah Nur Kamilah, Fathia Az Zahra, Syaikha Nabila Azzahra, dan Aldea Mei Sinta Putri. Terima kasih karena sudah menjadi teman yang baik selama masa perkuliahan. Segala kenangan baik akan

penulis ingat.

18. Untuk KKN Bangunsari 2. Terima kasih untuk Sakur, Bilal, Devina, Vina, Mawar, dan Elfia. Terima kasih atas segala kebaikan dan bantuan selama masa KKN berlangsung pada 2025 silam di Tanjung Sari, Lampung Selatan. Segala kenangan baik dan menyenangkan akan terus penulis ingat. Semoga selalu diliputi kesuksesan, ketenangan, dan kepada Sakur juga Elfia, semoga menjadi ahli hukum yang bermanfaat untuk banyak orang; untuk Devina semoga memperoleh kesuksesan dalam bidang bisnis maupun akuntansi; untuk Vina semoga segera menjadi penghuni Summarecon Bandung; untuk Mawar semoga kerja keras terbayarkan dan memperoleh *salary* yang diinginkan; dan untuk Bilal semoga menjadi dokter yang membantu banyak kesulitan orang lain.
19. Untuk Bude Rodiyah, Bude Siti, Bude Sanah, Aci, Rena, Evi, dan siapapun yang pernah berada di rumah. Terima kasih karena selalu mendoakan dan membersamai penulis saat menyelesaikan penyusunan skripsi, membuat makanan, menyokong semangat, dan selalu tulus mendoakan. Semoga semua keinginan baik terwujud dan menjalani hidup dengan ketenangan.
20. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih untuk tetap berjuang, terima kasih karena tidak berhenti meski menghadapi tekanan, rintangan, ketidakpastian, dan masalah lain dalam hidup. Semoga hal-hal baik selalu menyertai, ketenangan lahir dan batin selalu membersamai, dan kedalaman yang stabil senantiasa hadir dalam membantu banyak manusia lain. Terima kasih kepada Dwi Afriani, atau siapapun orang lain memanggil penulis: Afni, Frian, Dwi. Semoga selalu hidup dalam empati, rasa syukur, dan belas kasih.

Bandarlampung, 8 Mei 2026

Dwi Afriani
NPM. 2216071063

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori dan Konsep	12
2.2.1 <i>Foreign Policy Change</i>	12
2.2.2 Konsep <i>Environmental Policy Integration (EPI)</i>	18
2.3 Kerangka Pemikiran	19
III. METODE PENELITIAN	22
3.1 Tipe Penelitian.....	22
3.2 Fokus Penelitian	23
3.3 Teknik dan Jenis Pengumpulan Data.....	23
3.4 Teknik Analisis Data.....	24
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Deforestasi Hutan Amazon dan <i>Paris Agreement</i> pada Era Jair Bolsonaro (2019-2022) dan Luiz Inácio Lula da Silva (2023-)	27
4.1.1 Deforestasi Hutan Amazon pada Era Jair Bolsonaro dan Luiz Inácio Lula da Silva	27
4.1.2 Komitmen Brasil dalam <i>Paris Agreement</i> Era Jair Bolsonaro dan Luiz Inácio Lula da Silva.....	36

4.2 Perubahan Kebijakan Lingkungan Brasil era Jair Bolsonaro (2019-2022) dan Luiz Inácio Lula da Silva (2023-) dalam Konteks <i>Paris Agreement</i> dan Deforestasi Hutan Amazon	46
4.2.1 Restrukturisasi Lembaga Lingkungan sebagai <i>Problem/Goal Change</i>	48
4.2.2 Pelemahan Kapasitas Penegakan dan Regulasi sebagai <i>Problem/Goal Change</i>	58
4.2.3 Tata Kelola Masyarakat dan Wilayah Adat sebagai <i>Problem/Goal Change</i>	66
4.2.4 Strategi Pengendalian Deforestasi & Komitmen <i>Paris Agreement</i> sebagai <i>Problem/Goal Change</i>	79
4.2.5 Dinamika Pengambilan Keputusan Kebijakan Lingkungan.....	91
V. KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1.1 Peringkat negara bagian yang mengalami deforestasi di Amazon	32
Tabel 4.1.2 Peran negara dalam Paris Agreement	40
Tabel 4.2.1 Pola Perubahan dari Era Jair Bolsonaro ke Luiz Inácio Lula da Silva.....	53
Tabel 4.2.2 Pola Perubahan dari Era Jair Bolsonaro ke Luiz Inácio Lula da Silva.....	61
Tabel 4.2.3 Pola Perubahan dari Era Jair Bolsonaro ke Luiz Inácio Lula da Silva.....	72
Tabel 4.2.4 Pola Perubahan dari Era Jair Bolsonaro ke Luiz Inácio Lula da Silva.....	85
Tabel 4.2.5 Kesimpulan Komparasi	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Ide Utama Teori Hermann (1990).	16
Gambar 3.1 Model Miles dan Huberman.	26
Gambar 4.1.1 Luas Hutan Amazon yang mengalami deforestasi pada 2005-2021.	30
Gambar 4.1.2 Tutupan Hutan Amazon yang rusak pada periode pemerintahan Jair Bolsonaro.....	31
Gambar 4.1.3 Kawasan hutan yang rusak di negara bagian Para.....	33
Gambar 4.1.4 Deforestasi di Hutan Amazon periode 2012-2025.	34
Gambar 4.1.5 Perubahan tingkat deforestasi Hutan Amazon antara 2022 & 2025.	35
Gambar 4.1.6 Momentum adopsi Paris Agreement pada COP21 di Paris	42
Gambar 4.2.1 Pertemuan ruralista group (kelompok pro-agribisnis) dan Jair Bolsonaro serta Menteri Pertanian Brasil.....	49
Gambar 4.2.2 Grafik penurunan anggaran lembaga lingkungan.....	60
Gambar 4.2.3 Deforestasi di tanah adat dalam kawasan Hutan Amazon.	67

DAFTAR SINGKATAN

G7	: Group of Seven
REDD+	: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
NDC	: Nationally Determined Contribution
COP	: Conference of the Parties
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change
CMA	: Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement
IGO	: Intergovernmental Organization
NGO	: Non-Governmental Organization
UNCED	: United Nations Conference on Environment and Development
ILO	: International Labour Organization
CAT	: Climate Action Tracker
INPE	: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
DETER	: Detecção de Desmatamento em Tempo Real
PRODES	: Programa de Cálculo do Desflorestamento de Amazônia
PPCDAm	: Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal
MMA	: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SFB	: Serviço Florestal Brasileiro
CAR	: Cadastro Ambiental Rural
ICMBio	: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
IBAMA	: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
PNMC	: Política Nacional sobre Mudança do Clima
FUNAI	: Fundação Nacional dos Povos Indígenas
FBMC	: Fórum Brasileiro de Mudança do Clima

BNDES	: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômicoe Social
MP	: Ministério Público
RUU	: Rancangan Undang-Undang
PEC	: Proposta de Emenda á Constituição
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
FPIC	: Free, Prior and Informed Consent
HAM	: Hak Asasi Manusia
HI	: Hubungan Internasional
EPI	: Enviroment Policy Integration
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
CU	: Unidades de Conservação
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
CIM	: Comissão Interministerial
SDM	: Sumber Daya Manusia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan hujan tropis merupakan salah satu ekosistem paling penting bagi stabilitas lingkungan global. Salah satu contohnya adalah Hutan Amazon, kawasan hutan hujan tropis terbesar dengan luas lebih dari 2,3 juta mil persegi yang membentang di sembilan negara Amerika Selatan: Brasil, Peru, Kolombia, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis (Kara Anderson, 2024). Amazon sering dijuluki “paru-paru bumi” karena kemampuannya menyerap karbon dioksida melalui tutupan vegetasinya yang lebat (Greene et al., 2024). Julukan ini menggambarkan peran penting Amazon tidak hanya sebagai penyerap karbon, tetapi juga sebagai pengatur siklus hidrologi dan iklim global. Melalui transpirasi dan penyerapan gas-gas atmosfer, Amazon berperan penting dalam menjaga keseimbangan unsur air, karbon, dan udara yang menopang kehidupan di planet bumi.

Dari seluruh hutan hujan tropis yang masih tersisa di dunia, Hutan Amazon merupakan kawasan terbesar dengan 97% permukaannya masih tertutup hutan lebat. Kawasan ini menjadi habitat lebih dari 24 juta penduduk, termasuk ratusan ribu masyarakat adat yang tergabung ke dalam 180 kelompok etnis. Brasil menempati posisi teratas sebagai negara dengan kepemilikan 60 persen wilayah Amazon di dalam teritorialnya (WWF, 2022). Selama empat dekade terakhir, wilayah Amazon Brasil telah kehilangan lebih dari 18% tutupan hutan, setara dengan luas negara bagian California yang secara masif diakibatkan oleh penebangan liar, pertanian kedelai, dan peternakan sapi (Greenpeace, 2025). Sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, Brasil memegang tanggung jawab utama dalam upaya perlindungan ekosistem Amazon, meskipun peran dan keterlibatan organisasi lingkungan internasional, aktivis lintas negara, masyarakat

sipil, dan komunitas adat tetap menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan tersebut.

Keterlibatan berbagai aktor internasional baik negara maupun non-negara memiliki respon dan ekspektasi yang berbeda. Contohnya adalah deforestasi skala besar sejak 1960-an, yang semakin diperparah di bawah pemerintahan Bolsonaro melalui pengurangan penegakan hukum lingkungan dan pembukaan eksploitasi komersial. Pada 2019 saat kebakaran hutan meluas, Bolsonaro menolak dana bantuan senilai jutaan dolar dari anggota G7 dengan dalih bahwa negara-negara tersebut mencoba melanggar kedaulatan Brasil. Pilihan tersebut membawa tekanan internasional agar deforestasi segera diatasi. Meski Bolsonaro memiliki janji untuk mengakhiri deforestasi ilegal pada 2030 dan netralitas karbon pada 2050, Jerman dan Norwegia yang memberikan miliaran dolar kepada *Brazil's Amazon Fund* sejak 2008 untuk mempromosikan hutan hujan yang berkelanjutan memutuskan membekukan dukungan dana tersebut (Roy, 2022).

Selain bantuan dari negara donor, perjanjian internasional seperti *Paris Agreement* dan REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) dinilai menjadi mekanisme untuk menekan laju deforestasi melalui kerja sama global. Namun, saat pemerintahan Bolsonaro (2019-2022), *Nationally Determined Contribution (NDC)* melemah karena pelemahan regulasi iklim serta perubahan *baseline*, sedangkan pada periode awal pemerintahan Lula (2023-sekarang), terdapat upaya pemulihan komitmen iklim dengan penyelarasan kembali target NDC ke dalam nilai-nilai *Paris Agreement* (Proksch, 2025).

Tekanan internasional dari negara donor menunjukkan bahwa kredibilitas Brasil dalam mengimplementasikan komitmen norma rezim iklim sangat diperhatikan. Salah satu contohnya adalah citra Brasil dalam mendukung mitigasi perubahan iklim, negara tersebut memegang peran sentral diplomasi lingkungan sejak menjadi tuan rumah *Earth Summit* di Rio de Janeiro pada 1992 (United Nations, 1997). Bahkan, diplomasi Brasil pernah dihormati dan dikenal kuat melalui Celso Amorim, menteri luar negeri di bawah pemerintahan Lula, yang dinyatakan sebagai menteri luar negeri terbaik dunia melalui kolom opini di *Foreign Policy* karena keberhasilan negosiasinya (Bryce, 2023). Tetapi, reputasi tersebut menurun karena kebijakan domestik Brasil di era Jair Bolsonaro

melemahkan perlindungan lingkungan dan mempercepat degradasi, tercatat sebagai yang tertinggi selama lima belas tahun pada 2021 sebagaimana dianalisis dalam laporan Proksch (2025).

Orientasi kebijakan luar negeri Brasil bervariasi pada setiap periode pemerintahan. Pergeseran ini membentuk posisi Brasil dalam diplomasi lingkungan global serta mempengaruhi kelestarian Hutan Amazon. Badan penelitian luar angkasa Brasil (INPE) pernah mencatat deforestasi pada masa pemerintahan Bolsonaro, mencapai 13.235 kilometer persegi, setara tujuh belas kali ukuran kota New York (Roy, 2022). Hal ini mengurangi kredibilitas Brasil di panggung internasional serta memperlemah kekuatan *soft power*-nya dalam masalah iklim. Karena diplomasi iklim tetap bisa menjadi peluang untuk memulihkan pengaruh global, tetapi hanya akan tercapai jika disertai komitmen domestik yang konsisten terhadap perlindungan dan kebijakan iklim itu sendiri (King's College London, 2021). Dengan demikian, perubahan orientasi yang ada menunjukkan bahwa dinamika politik luar negeri Brasil dapat berimplikasi pada kebijakan domestik.

Dalam konteks Amazon, hutan tersebut tidak hanya sebagai kepentingan Brasil, melainkan kepentingan seluruh planet karena menyimpan lebih dari 150 miliar ton karbon dunia (Bryce, 2023). Tetapi, dalam periode 2003-2019 Hutan Amazon telah kehilangan cadangan karbon bruto sebesar 3.042 megaton, dengan 56% disebabkan oleh deforestasi (Kruid et al., 2021). Selain karena deforestasi, degradasi juga menghasilkan emisi yang dapat melebihi deforestasi dengan perkiraan mencapai 0,2 petagram karbon per tahun (Lapola et al., 2023). Kondisi tersebut menjadikan kelestarian Amazon sebagai perhatian global, sehingga regulasi seperti REDD+ dimasukkan ke dalam *Paris Agreement* sebagai instrumen untuk menekan laju deforestasi (Coalition for Rainforest Nations, 2025).

Selain para ilmuwan biologi dan geosains, keberadaan tutupan Hutan Amazon beserta ketahanan habitatnya juga menjadi fokus perhatian komunitas internasional. Sehingga secara ideal, Brasil sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar diharapkan melakukan kebijakan luar negeri dengan konsisten untuk mengimplementasikan komitmen iklim dan menjaga fungsi Amazon sebagai penyerap karbon global. Tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Jair Bolsonaro, deforestasi Amazon melonjak pada tingkat tertinggi

selama 15 tahun terakhir, sejalan dengan pelanggaran regulasi dan pemotongan anggaran lembaga lingkungan (Roy, 2022). Sebaliknya, setelah Lula kembali memegang kepemimpinan, pemerintah meluncurkan rencana ambisius untuk menghentikan deforestasi pada 2030 dan kembali mengaktifkan *Amazon Fund* sebagai bagian dari kebijakan nasional (Spring & Bloadle, 2021).

Jair Bolsonaro yang memimpin sejak 2019-2022 menunjukkan pelemahan implementasi komitmen melalui deregulasi dan turunnya kapasitas penegakan deforestasi, yang secara langsung berseberangan dengan arah ideal rezim lingkungan. Data resmi INPE menunjukkan bahwa pada 2021 deforestasi mencapai 13.235 km², skor tertinggi dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, meningkat 22% dibanding tahun sebelumnya (Spring & Bloadle, 2021). Rata-rata tahunan deforestasi selama masa pemerintahan Bolsonaro adalah 11.396 km², 60% lebih tinggi dibandingkan periode 2015-2018 (Angelo, 2022). Pada tahun terakhir pemerintahannya, deforestasi masih tercatat sebesar 11.568 km², menjadi periode dengan laju kerusakan hutan paling tinggi di lebih dari satu dekade sebagaimana dianalisis dalam penelitian Angelo (2022).

Era pemerintahan Bolsonaro juga menunjukkan eskalasi kebijakan yang mendukung ekstraktivisme total, di mana pemerintah memberi dukungan terhadap pertambangan, agribisnis, dan proyek infrastruktur (Menezes & Barbosa, 2021). Praktik pro-ekstraktif juga terlihat dalam laporan *Universal Rights Group* yang menunjukkan bahwa deforestasi Hutan Amazon naik sebesar 34,5% dalam satu tahun, seiring dengan pengajuan undang-undang yang melonggarkan pembatasan sektor pertambangan, minyak, gas, dan pertanian skala besar. Keadaan tersebut tidak hanya memperparah degradasi, tetapi juga memicu pengaduan para pemimpin adat Brasil kepada Pengadilan Kriminal Internasional yang menganggap bahwa kebijakan Bolsonaro merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (Montoya, 2021).

Bolsonaro turut berkontribusi pada peningkatan kebakaran Hutan Amazon karena alih fungsi Hutan menjadi lahan pertanian dan peternakan. Misalnya pada Agustus 2019, lebih dari 60.000 kebakaran dilaporkan di seluruh kawasan Hutan Amazon yang menyulut kekhawatiran global terkait kerusakan lingkungan (Council of Foreign Relations, n.d.). Pada pertemuan kelompok G7 di Prancis, para pemimpin dunia menjanjikan lebih dari \$22 juta untuk membantu pemadam

kebakaran, namun Brasil menolak bantuan tersebut. Di sisi lain, Norwegia dan Jerman menahan lebih dari \$72 juta setelah Brasil menanggukkan *Amazon Fund* yang dibentuk untuk mencegah dan mengatasi deforestasi di kawasan tersebut. Pada 2021, Kongres Brasil mempertimbangkan RUU yang akan melegitimasi *illegal squatting* (memasuki dan menempati suatu properti secara ilegal tanpa izin pemilikannya). Dengan demikian, seluruh integrasi pelemahan lingkungan yang menyebabkan deforestasi skala besar di bawah Jair Bolsonaro telah menciptakan gerakan protes yang dipimpin oleh kelompok pribumi di seluruh Brasil (Council of Foreign Relations, n.d.).

Di sisi lain, sejak pelantikan presiden pada Januari 2023, Luiz Inácio Lula da Silva mengeluarkan dekrit untuk mencabut dan mengubah kebijakan anti-lingkungan peninggalan pemerintahan Jair Bolsonaro. Lula membatalkan penambangan di tanah pribumi dan kawasan lindung, deforestasi bioma Amazon dan Cerrado dihentikan, dan *Amazon Fund* yang sebelumnya ditangguhkan kembali diberikan kepada Brasil oleh negara-negara maju. Selain itu, Lula juga menciptakan Kementerian Masyarakat Adat yang belum pernah ada dalam sejarah Brasil sebelumnya (Mendes, 2023). Lula memprakarsai berbagai langkah dalam upaya membalikkan kerusakan yang telah dilakukan Jair Bolsonaro terhadap lingkungan dan masyarakat adat Amazonia (Vilani et al., 2023). Kebijakan yang Lula perhatikan pada hari pertama masa jabatannya menunjukkan upaya Brasil untuk memperkuat kembali kapasitas institusional dan arah diplomasi iklim di tingkat global. Perubahan arah kebijakan pada kepemimpinan Lula menunjukkan upaya Brasil untuk memulihkan reputasinya dalam arena lingkungan global setelah periode yang penuh kontroversi di era Jair Bolsonaro.

Secara empiris, perubahan kebijakan lingkungan dari Jair Bolsonaro ke Luiz Inácio Lula da Silva dapat dianalisis karena pergeseran prioritas pemerintahan Brasil melalui kerangka *Foreign Policy Change Charles F. Hermann*. Mengacu pada *Hermann (1990) Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy*, perubahan kebijakan luar negeri tidak selalu dalam perubahan total arah kebijakan, tetapi dapat ditandai dalam berbagai macam bentuk, seperti penyesuaian kebijakan (*adjustment changes*) hingga perubahan tujuan (*problem/goal changes*) serta orientasi internasional suatu negara (*international*

orientation changes). Dalam kerangka ini, perbedaan sikap Brasil terhadap isu lingkungan dalam komitmennya terhadap *Paris Agreement* sebagai perjanjian internasional, serta kebijakan tata kelola deforestasi Hutan Amazon dapat dipahami sebagai hasil dari perubahan kebijakan pemerintah yang dipicu oleh pergantian kepemimpinan.

Untuk menjelaskan perubahan kebijakan lingkungan Brasil dari satu periode ke periode selanjutnya, skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat memahami proses perubahan kebijakan secara komprehensif. Pendekatan kualitatif dipilih karena diharapkan mampu menelaah bagaimana pergeseran kebijakan pemerintah memengaruhi kebijakan lingkungan dalam isu perubahan iklim. Melalui studi kasus perubahan kebijakan yang berbeda pada dua periode pemerintahan, skripsi ini mencoba menjelaskan perubahan kebijakan lingkungan Brasil sebagai kebijakan domestik yang memiliki dimensi internasional, dan menelaah bagaimana perubahan tersebut terlihat dalam kebijakan tata kelola Hutan Amazon serta implikasinya terhadap deforestasi.

Perubahan kebijakan lingkungan Brasil dari periode pemerintahan Jair Bolsonaro (2019-2022) ke periode pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva (2023-sekarang) menunjukkan dinamika kebijakan yang tidak hanya dipahami sebagai persoalan komitmen global dan praktik domestik. Perbedaan kebijakan yang ada juga menunjukkan adanya pergeseran prioritas dan tujuan pemerintah dalam merespons isu lingkungan global, khususnya dalam komitmen terhadap *Paris Agreement*. Oleh karena itu, skripsi ini menganalisis perubahan kebijakan lingkungan Brasil dengan menggunakan kerangka perubahan kebijakan luar negeri sebagai instrumen analisis, tanpa mengabaikan jika kebijakan tersebut tetap berakar pada konteks domestik. Dengan menempatkan Brasil dalam kerangka tersebut, penelitian ini mencoba memahami bagaimana perubahan kebijakan lingkungan yang memiliki dimensi internasional berkembang dari periode Jair Bolsonaro ke Luiz Inácio Lula da Silva, dan bagaimana perubahan tersebut terlihat dalam kebijakan tata kelola Hutan Amazon serta implikasinya terhadap tingkat deforestasi.

1.2 Rumusan Masalah

Perubahan kebijakan lingkungan Brasil menunjukkan dinamika yang berbeda di berbagai pemerintahan, khususnya dalam upaya pengendalian deforestasi di Hutan Amazon. Sebagai negara dengan wilayah hutan tropis terbesar di dunia, Brasil memiliki posisi kunci dalam implementasi *Paris Agreement*, khususnya dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pelestarian ekosistem hutan. Tetapi, dalam praktiknya, arah kebijakan lingkungan yang diadopsi Brasil tidak selalu sama dan mengalami perubahan sejalan dengan pergantian pemimpin negara. Pada era Jair Bolsonaro, kebijakan lingkungan Brasil cenderung kurang berkomitmen terhadap upaya konservasi hutan, sebagaimana dibuktikan oleh laju deforestasi Hutan Hujan Amazon. Sebaliknya, di bawah kepemimpinan Luiz Inácio Lula da Silva, muncul inisiatif yang bertujuan menghidupkan kembali komitmen lingkungan dan menahan laju deforestasi. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan lingkungan Brasil dalam menghadapi isu perubahan iklim, termasuk sikap terhadap perjanjian internasional *Paris Agreement*, yang terlihat dalam kebijakan nasional terkait deforestasi Hutan Amazon. Berdasarkan fenomena di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana perubahan kebijakan lingkungan Brasil pada era Jair Bolsonaro dan Luiz Inácio Lula da Silva dalam konteks *Paris Agreement* dan deforestasi Hutan Amazon?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan kebijakan lingkungan Brasil pada era pemerintahan Jair Bolsonaro dan Luiz Inácio Lula da Silva dalam konteks *Paris Agreement* serta dampaknya terhadap deforestasi Hutan Amazon.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat akademis dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan studi HI, khususnya terkait analisis perubahan kebijakan lingkungan yang mempunyai dimensi internasional dan keterkaitan dengan

komitmen global dalam *Paris Agreement*. Penelitian ini juga memperkaya pengaplikasian *Foreign Policy Change* dari Charles F. Hermann (1990) dengan menggunakannya pada isu lingkungan, serta mengombinasikannya dengan konsep *Environmental Policy Integration* (EPI) untuk menilai integrasi kebijakan lingkungan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji relasi antara kebijakan domestik, komitmen internasional dalam *Paris Agreement*, dan dampaknya terhadap isu lingkungan global seperti deforestasi hutan hujan tropis di negara-negara berkembang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dan perbandingan terkait topik yang akan diteliti. Pertama, penelitian terdahulu yang membahas bahwa kebijakan luar negeri Brasil di era Jair Bolsonaro mengalami transisi orientasi akibat dominasi faktor domestik dan ideologi populisme kanan. Seperti dalam *The Strategy of Chaos: Brazilian Foreign Policy under Jair Bolsonaro (2019-2022)* oleh Diego Santos Vieira de Jesus (2022), yang menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Brasil masih banyak ditentukan oleh kepentingan politik domestik dan kebutuhan dalam memuaskan basis pendukung Bolsonaro dibandingkan komitmen global. Temuan tersebut sejalan dengan *Brazilian foreign policy under Jair Bolsonaro; far-right populism and the rejection of the liberal international order* oleh Casarões dan Farias (2021), yang menekankan bahwa populisme kanan menjadi pendorong utama penolakan Brasil terhadap tatanan liberal dan multilateralisme. Identitas kebijakan luar negeri juga dibahas dalam *Far-right populism and foreign policy identity* oleh Guimarães dan Silva (2021), yang membahas konsep thick dan thin conservative identity untuk menjelaskan pola hubungan Jair Bolsonaro dengan sekutu ideologis dan rivalnya. Sementara itu, *Political Realignment in Brazil: Jair Bolsonaro and the Right Turn* oleh Bastos (2019) membahas perubahan kebijakan Brasil dalam konteks realignment politik pasca pemilu di 2018 yang ditandai oleh lemahnya kapasitas pemerintahan, penggunaan media sosial insentif, dan rapuhnya institusi politik, yang secara komprehensif membentuk kebijakan luar negeri yang konfrontatif dan tidak stabil.

Sementara itu, kelompok penelitian lain berfokus pada kebijakan luar negeri Brasil di era Luiz Inácio Lula da Silva yang ditandai oleh perubahan

menuju multilateralisme dan peningkatan peran Brasil di panggung internasional. *Lula's foreign policy and the quest for autonomy through diversification* oleh Vigevani dan Cepaluni (2007), membahas bahwa kebijakan luar negeri Lula da Silva pada periode awal ditandai dengan strategi *autonomy through diversification*, yaitu upaya memperluas kemitraan internasional untuk mengurangi ketergantungan pada satu kekuatan besar. Hal ini sejalan dengan penelitian Cervo (2011) dalam *Os objetivos da Política Exterior de Lula*, yang menegaskan transisi dari idelalisme liberal era Cardoso menuju pendekatan multipolar dan menguatkan kerja sama antar negara-negara selatan. Penelitian Ramanzini Júnior (2010) berjudul *Uma análise da política externa do governo Lula da Silva* yang membahas bahwa aktivitas multilateral, penciptaan aliansi strategis seperti G20, dan diversifikasi hubungan ekonomi menjadi ciri utama kebijakan luar negeri Lula da Silva. Penelitian-penelitian tersebut diperbarui oleh Rodrigues (2023) dalam *Lula III lewat Autonomia pragmática? A nova política externa de Lula*, yang membahas upaya pemulihan modal diplomatik melalui konsep *pragmatic autonomy*. Penelitian ini sejalan dengan *Lula 3.0: foreign policy reconstruction and Brazil's return to the world* oleh Faleiro (2025), yang membahas perubahan keterikatan Brasil dengan organisasi internasional, perbaikan kepemimpinan regional, dan penempatan isu lingkungan sebagai strategi reposisi global.

Selain itu, beberapa penelitian menyoroiti kebijakan lingkungan yang menunjukkan bahwa perubahan pemerintahan Brasil berdampak langsung dalam tata kelola Hutan Amazon. Penelitian berjudul *Politica Ambiental Brasileira (2003-2022)* oleh Novelli (2024) menunjukkan adanya keberlanjutan regulasi lingkungan, tetapi juga menemukan pecahnya keberlanjutan pada era Jair Bolsonaro melalui pelemahan institusi lingkungan dan turunnya partisipasi masyarakat sipil. Penelitian lain yang berjudul *O desmonte da agenda ambiental No. governo Bolsonaro* oleh Scantimburgo (2018) membahas bahwa pemerintahan Jair Bolsonaro secara teratur melemahkan agenda lingkungan melalui deregulasi, skeptis terhadap perubahan iklim, maupun prioritasnya pada eksploitasi sumber daya alam, yang berimplikasi terhadap peningkatan deforestasi dan isolasi Brasil dalam dunia internasional. Sementara itu, dalam penelitian *Brazil's new environmental policy* oleh Nikolaeva (2024) membahas bahwa kembalinya Lula da

Silva menandai transisi dengan menjadikan agenda lingkungan sebagai prioritas kebijakan nasional dan internasional. Penelitian tersebut diperkuat dalam temuan Numadi (2024) yang berjudul *The Outlook of Brazilian Amazon Forest Restoration under the Leadership of President Lula da Silva* dan penelitian Seijo (2022) *What Lula means for Brazilian science*, yang membahas adanya penurunan deforestasi Hutan Amazon serta perlindungannya yang meningkat melalui penguatan hukum, perlindungan masyarakat adat, maupun kerja sama global.

Sejumlah penelitian lain menempatkan *Paris Agreement* sebagai konteks krusial dalam kebijakan iklim di Brasil. Penelitian yang berjudul *Challenges in implementing COP 21 obligations in Brazil until 2022* oleh Mathias (2024), membahas bahwa implementasi dan komitmen Brasil terhadap isu iklim menghadapi hambatan serius akibat deforestasi, terbatasnya pendanaan, serta konflik antara prioritas lingkungan dan ekonomi. Penelitian lain yang serupa berjudul *Green with savvy? Brazil's climate pledge to the Paris Agreement and its transition to the green economy* oleh Giacomelli Sobrinho membahas target mitigasi emisi Brasil terlalu ambisius dan lebih efektif jika fokus pada pengembangan energi terbarukan. *Brazil cannot risk its environmental leadership* oleh Loyola (2014) juga membahas kontradiksi peran kepemimpinan internasional di Brasil dalam isu lingkungan global dan kebijakan domestik yang melemahkan ekosistem hingga meningkatkan degradasi lingkungan dan emisi karbon. Penelitian lain meegaskan jika perubahan kebijakan di tingkat nasional tidak selalu secara langsung menghasilkan perubahan implementasi. Misalnya dalam *Gobernanza multinivel del cambio climático en Brasil* oleh Barbi (2025) menunjukkan jika kebijakan iklim Brasil sangat dipengaruhi oleh manajemen multilevel yang terdiri dari aktor pemerintah pusat, daerah, dan non-negara. Stuid Barbi juga menekankan bahwa lemahnya koordinasi dan kapasitas institusional pada era Jair Bolsonaro menghambat efektivitas kebijakan iklim. Tetapi, kerja sama global dan peran aktor subnasional dilihat sebagai peluang untuk memperkuat kebijakan lingkungan dan menghadapi krisis iklim sebagai masalah struktural.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu, dapat dilihat jika literatur terkait Brasil banyak membahas perubahan arah kebijakan luar negeri akibat kepemimpinan presiden, perubahan orientasi multilateralisme pada era Luiz Inácio Lula da Silva,

dan populisme kanan serta penolakan terhadap tatanan internasional liberal di era Jair Bolsonaro. Sejumlah penelitian lain juga membahas kebijakan lingkungan serta deforestasi Hutan Amazon sebagai dampak dari transisi prioritas pemerintah, dan menempatkan *Paris Agreement* sebagai konteks krusial dalam kebijakan iklim Brasil. Tetapi, kajian-kajian tersebut umumnya masih berdiri terpisah antara analisis kebijakan luar negeri, kebijakan lingkungan, isu deforestasi, dan belum ada yang secara sistematis menjelaskan keterkaitan antara perubahan kebijakan lingkungan dengan dinamika perubahan kebijakan yang mempunyai dimensi internasional, khususnya dalam konteks pergantian kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu, skripsi ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis perubahan kebijakan lingkungan Brasil menggunakan kerangka teori *Foreign Policy Change* oleh Charles F. Hermann (1990), sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait transisi arah kebijakan lingkungan Brasil dari era Jair Bolsonaro menuju era Luiz Inácio Lula da Silva dalam konteks *Paris Agreement* serta implikasinya terhadap laju deforestasi Hutan Amazon.

2.2 Landasan Teori dan Konsep

2.2.1 *Foreign Policy Change*

Skripsi ini menggunakan teori Perubahan Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Change*). Perubahan kebijakan luar negeri adalah bagian dari kajian Analisis Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Analysis*) yang menegaskan berbagai cara, seperti perspektif teoritis, tingkat analisis, maupun eksplanasi terkait berbagai penyebab terjadinya variasi dalam kebijakan luar negeri (Husna et al., 2022). Melalui teori perubahan kebijakan luar negeri Charles Hermann (1990), skripsi ini akan menjelaskan keanekaragaman kebijakan lingkungan Brasil dari era Jair Bolsonaro (2019-2022) ke era Luiz Inácio Lula da Silva (2023-sekarang).

Perubahan kebijakan luar negeri berada di bawah payung besar analisis perubahan kebijakan luar negeri. Tetapi, tidak semua perubahan memiliki tingkat signifikansi yang sama. Misalnya, dalam *Man, the State and War* yang diterbitkan pada 1959, Kenneth Waltz membedakan tiga tingkat analisis: tingkat individu, tingkat nasional, dan sistem internasional. Sedangkan dalam *Changing Course: When Government Choose to Redirect Foreign Policy* oleh Charles F. Hermann

(1990), perubahan adalah sesuatu yang selalu ada dalam kebijakan luar negeri. Tetapi, Hermann memfokuskan perubahan kajian luar negeri tidak hanya mencakup perubahan kecil atau penyesuaian rutin, melainkan arah perubahan kebijakan yang signifikan saat pemerintah yang sama memutuskan untuk mengubah kebijakan yang sebelumnya dijalankan. Hermann menyebutnya sebagai bentuk “redireksi” dalam kebijakan luar negeri.

Hermann mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai program yang mengarah pada tujuan dan pemecahan masalah yang dirumuskan oleh aktor pembuat kebijakan yang berwenang dan ditujukan kepada pihak di luar yurisdiksi negaranya (Hermann, 1990). Berdasarkan definisi tersebut, Hermann menyatakan jika kebijakan luar negeri dapat mengalami empat tingkat perubahan, pertama, *Adjustment Changes*, yaitu perubahan pada tingkat usaha atau cakupan tanpa mengubah tujuan maupun cara utama kebijakan. Kedua, *Program Changes*, yaitu perubahan dalam metode atau instrumen, tetapi tujuan masih sama. Ketiga, *Problem/Goal Changes*, yaitu perubahan dalam tujuan atau masalah yang ingin dicapai. Keempat, *International Orientation Changes*, yaitu perubahan paling mendasar yang melibatkan arah dan peran negara dalam sistem internasional (Hermann, 1990). Selain tingkat perubahan, Herman juga mengemukakan bahwa perubahan kebijakan dapat didorong oleh empat agen, yaitu *Leader Driven*, *Bureaucratic Advocacy*, *Domestic Restructuring* dan *External Shock*. Keempat agen tersebut menjadi sumber yang dapat mendorong terjadinya perubahan kebijakan luar negeri menurut Herman (1990):

1. *Leader Driven*. Perubahan yang didorong oleh pemimpin terjadi saat pembuat kebijakan memiliki otoritas besar, biasanya seorang kepala pemerintahan, yang secara sadar mendorong perubahan besar dalam kebijakan luar negeri berdasarkan visinya sendiri. Sehingga, arah perubahan tersebut datang langsung dari keyakinan dan keputusan pemimpin. Agar perubahan berhasil, pemimpin tersebut harus memiliki kepercayaan diri yang besar, kekuasaan yang cukup, dan energi untuk menggerakkan pemerintahannya agar mengikuti arah baru yang ia inginkan.
2. *Bureaucratic Advocacy*. Birokrasi dalam konteks Hermann mengacu pada sekelompok orang di dalam pemerintahan yang secara aktif mendukung

perubahan kebijakan tersebut. Kelompok ini bisa berada dalam satu lembaga tertentu, atau tersebar pada beberapa organisasi berbeda, namun tetap memiliki cara untuk berinteraksi secara rutin. Agar efektif, para pendukung perubahan dalam kelompok ini harus ditempatkan pada posisi yang strategis, sehingga memiliki akses ke pejabat tinggi untuk menyuarakan gagasan mereka.

3. ***Domestic Restructuring***. Restrukturisasi domestik mengacu pada perubahan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang secara politik dibutuhkan, yaitu kelompok yang dukungannya diperlukan oleh rezim agar tetap berkuasa. Saat komposisi atau sikap kelompok-kelompok tersebut berubah, mereka dapat mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Dalam konteks ini, perubahan kebijakan luar negeri terjadi saat elite politik di pemerintahan memiliki kekuatan untuk melegitimasi dan mengubah cara pandang mereka.
4. ***External Shock***. Guncangan eksternal dalam konteks ini merupakan perubahan kebijakan luar negeri yang didorong oleh peristiwa internasional besar yang mengejutkan. Sebagian besar perubahan kebijakan luar negeri biasanya muncul karena pemimpin melihat perubahan kecil di lingkungan global. Tetapi, seringkali perubahan yang terjadi tidak terlalu dramatis (cakupannya kecil dan dampaknya terbatas). Sementara itu, guncangan eksternal merupakan peristiwa yang sangat mencolok dan berdampak langsung. Guncangan semacam itu tidak dapat diabaikan, dan bisa memicu perubahan kebijakan luar negeri yang signifikan. Contohnya: kebijakan Richard Nixon pada 1971 yang menghentikan konversi dolar ke emas. Dalam setiap guncangan, peristiwa besar tersebut berkontribusi pada perubahan kebijakan luar negeri yang krusial di lebih dari satu negara. Karena dampaknya besar, maka sistem dipaksa merespons dan menyesuaikan diri.

Dalam skripsi ini, empat agen perubahan yang diklasifikasikan oleh Hermann (1990) digunakan sebagai alat analitis untuk mengidentifikasi sumber utama yang memicu perubahan kebijakan lingkungan Brasil, sehingga *Agents of Change* tidak hanya dipaparkan sebagai bagian dari teori *Foreign Policy Change*, tetapi juga digunakan sebagai alat operasional dalam membaca proses perubahan dari era Jair Bolsonaro ke era Luiz Inácio Lula da Silva.

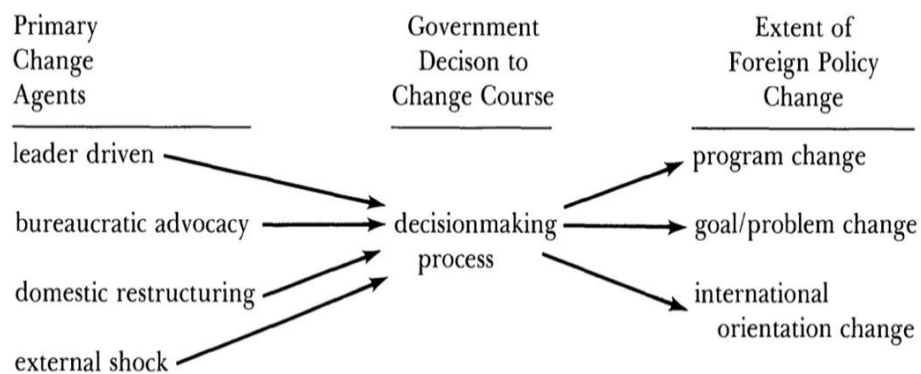
Hermann menegaskan bahwa perubahan kebijakan berlangsung melalui proses pengambilan keputusan (*decision making process*) yang memediasi (sebagai perantara) antara agen perubahan dan tingkat perubahan kebijakan. Proses keputusan yang ada dapat menghambat maupun mendorong perubahan, tergantung pada bagaimana informasi terkait kegagalan atau ketidaksesuaian kebijakan diproses oleh aktor pembuat kebijakan (Hermann, 1990). Hermann juga menyatakan bahwa banyak perubahan kebijakan didorong oleh persepsi kegagalan atau tidakmampuan kebijakan sebelumnya dalam mengatasi tantangan yang ada. Sehingga, informasi yang menunjukkan adanya kegagalan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi, penyusunan ulang kebijakan, atau pembaruan besar terhadap kebijakan.

Penting untuk ditinjau bahwa berbagai agen perubahan kebijakan luar negeri tidak selalu beroperasi secara terpisah. Interaksi antar satu agen dengan agen yang lain sangat mungkin terjadi. Dalam kasus tertentu, agen-agen tersebut bisa bekerja bersama-sama. Sementara dalam kasus unik, satu agen, misalnya *External Shock* dapat mengaktifkan agen lain, seperti inisiatif yang digerakkan oleh pemimpin, yang kemudian menghasilkan peralihan kebijakan. Maka dengan itu, agen-agen perubahan tidak hanya berdiri sendiri, tetapi dapat saling mempertegas dan memediasi satu sama lain. Penjelasan teoretis terkait perubahan kebijakan luar negeri juga tidak harus berdiri sendiri, beberapa teori dapat digabungkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap perubahan kebijakan (Hermann, 1990).

Selain itu, Hermann juga menyatakan bahwa sebagian besar pendekatan teoretis tersebut memiliki asumsi yang sama, yaitu bahwa perubahan sering kali dipicu oleh kegagalan. Saat kebijakan sebelumnya atau cara pandang lama dianggap tidak efektif sekaligus tidak mampu menjelaskan situasi yang dihadapi, timbul dorongan untuk merevisi ulang kebijakan. Dalam tingkat individu, hal tersebut dapat mendorong proses perubahan dan pembelajaran cara berpikir. Sementara dalam tingkat pemerintahan, informasi seputar kegagalan kebijakan dapat memperkuat posisi kelompok yang hendak mendorong perubahan. Dan dalam tingkat domestik, restrukturisasi politik kerap kali muncul karena

ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah maupun perubahan kelompok yang memegang pengaruh politik.

Dalam pendekatan teoretisnya, Herman (1990) mengemukakan suatu pertanyaan: jika diasumsikan bahwa perubahan kebijakan luar negeri terjadi lewat keputusan yang disengaja secara sadar, maka, bagaimana informasi terkait kegagalan masuk ke dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam situasi apa informasi tersebut benar-benar menghasilkan perubahan besar? Maka dengan itu, meskipun banyak agen perubahan telah diidentifikasi, perubahan kebijakan tidak terjadi secara otomatis. Di antara agen perubahan dan hasil akhir kebijakan, selalu ada proses pengambilan keputusan yang digambarkan dalam diagram berikut (Hermann, 1990):



Gambar 2.1 Bagan Ide Utama Teori Hermann (1990).

Sumber: Charles F. Hermann (1990)

Jika ingin mengubah arah kebijakan luar negeri, agen perubahan juga harus masuk dan bekerja lewat proses pengambilan keputusan pemerintah. Perubahan tidak terjadi hanya karena tekanan, kritik, maupun peristiwa besar. Sehingga, proses pengambilan keputusan yang terjadi dapat menghambat, atau justru mendukung perubahan. Tergantung bagaimana informasi dipahami oleh agen, siapa yang menyampaikan, dan bagaimana para pemimpin negara menilai urgensinya (Hermann, 1990). Untuk memahami perubahan kebijakan luar negeri secara jernih, Hermann menyarankan agar peneliti dapat melihat tahapan dalam proses pengambilan keputusan dengan pertanyaan inti: kapan informasi terkait kegagalan kebijakan mulai diperhatikan, serta dalam situasi seperti apa informasi tersebut

mendorong keputusan agen untuk mengubah kebijakan luar negeri (Hermann, 1990).

Dengan demikian, teori *Foreign Policy Change* Hermann menyediakan kerangka analisis untuk mengidentifikasi: (a) tingkat perubahan kebijakan, (b) agen yang mendorong perubahan kebijakan, (c) proses keputusan yang memediasi (perantara) antara sumber perubahan dan hasil akhir. Dalam skripsi ini, kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis perubahan kebijakan lingkungan Brasil dari era pemerintahan Jair Bolsonaro ke era pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva dalam konteks *Paris Agreement* dan dampaknya terhadap deforestasi Hutan Amazon. Adapun teori *Foreign Policy Change* dipilih karena telah dirancang untuk menganalisis perubahan kebijakan luar negeri dari segi tingkat perubahan maupun sumber perubahan yang memicunya. Kerangka ini sesuai dengan fokus skripsi yang menelaah perubahan kebijakan lingkungan Brasil dari era pemerintahan Jair Bolsonaro ke era pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva. Melalui tingkat perubahan dan agen perubahan, teori ini memberikan alat analisis yang runtut untuk mengidentifikasi bentuk dan faktor pendorong perubahan kebijakan yang terjadi dalam suatu entitas.

Meskipun *Foreign Policy Change* berfokus pada perubahan kebijakan luar negeri, Hermann juga menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor domestik, seperti *leader driven*, *bureaucratic advocacy*, dan *domestic restructuring* dalam negeri. Maka dengan itu, perubahan kebijakan tidak hanya dipahami sebagai respons terhadap tekanan dari luar (eksternal), tetapi juga hasil dari proses internal dalam sistem politik suatu negara. Oleh sebab itu, penggunaan teori FPC dalam skripsi ini relevan untuk menganalisis perubahan kebijakan lingkungan Brasil, yang meskipun berakar dari kebijakan domestik, tetap mempunyai hubungan erat dengan komitmen internasional, khususnya dalam konteks *Paris Agreement*. Selain itu, meskipun perubahan yang dianalisis berada dalam konteks kebijakan luar negeri, khususnya komitmen terhadap *Paris Agreement*, faktor pendorong yang paling utama dalam perubahan tersebut berasal dari fluktuasi politik domestik, sehingga Hermann menempatkan kategori agen perubahan seperti *bureaucratic advocacy* dan *domestic restructuring*. Dalam skripsi

ini, yang bersifat luar negeri adalah objek kebijakannya, yaitu *Paris Agreement* dan komitmen iklim global, dan bukan pada sumber perubahannya.

2.2.2 Konsep *Environmental Policy Integration (EPI)*

Integrasi Kebijakan Lingkungan (EPI) mengacu pada sejauh mana perhatian lingkungan dimasukkan ke dalam kebijakan publik. Konsep ini muncul pada tahun 1990-an sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menghubungkan pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, dan perlindungan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, seperti yang ditekankan dalam Laporan Brundtland (*Our Common Future*) (Jordan & Lenschow, 2010). Alih-alih menjadikan perlindungan lingkungan sebagai bidang kebijakan yang terpisah, EPI menekankan bahwa pertimbangan lingkungan harus dimasukkan dalam semua sektor pembuatan kebijakan. Hal ini berarti bahwa kebijakan tidak hanya diharapkan untuk mengakui isu-isu lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa perlindungan lingkungan menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan (Jordan & Lenschow, 2010).

Secara konseptual, EPI bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan lingkungan tidak menjadi perhatian sekunder dalam pembuatan kebijakan, tetapi berfungsi sebagai tujuan utama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, kebijakan diharapkan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang (Jordan & Lenschow, 2010). Tetapi, dalam praktiknya, implementasi EPI seringkali sulit. Studi menunjukkan bahwa interpretasi yang kuat tentang EPI belum sepenuhnya tertanam dalam proses politik sehari-hari, bahkan di negara-negara yang dianggap sebagai pelopor lingkungan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas pembuatan kebijakan, yang melibatkan banyak aktor, kepentingan yang bersaing, dan penggunaan instrumen kebijakan yang berbeda (Jordan & Lenschow, 2010).

EPI dapat dipahami melalui dua pendekatan, yakni pendekatan normatif dan pendekatan rasional. Adapun pendekatan normatif menegaskan bahwa kepentingan lingkungan harus diutamakan dalam kebijakan, sehingga memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan kepentingan lain. Pendekatan ini bersifat absolut, di mana perpaduan kebijakan lingkungan dinilai berdasarkan apakah lingkungan menjadi

prioritas utama atau hanya menjadi kebijakan yang termarginalisasi. Sementara itu, pendekatan rasional melihat EPI sebagai suatu jangkauan, di mana keseluruhan kebijakan lingkungan dapat terjadi dalam berbagai tingkatan, dari yang lemah hingga yang kuat. Pendekatan ini dinilai lebih fleksibel karena memungkinkan analisis terhadap variasi akumulasi kebijakan dalam konteks politik yang berbeda (Jordan & Lenschow, 2010).

Berdasarkan pemahaman ini, EPI dapat bervariasi kekuatannya. EPI yang lemah (*Weak EPI*) terjadi ketika masalah lingkungan hanya diakui secara formal tetapi tidak diimplementasikan atau diprioritaskan secara efektif. Sebaliknya, EPI yang kuat (*Strong EPI*) terjadi ketika perlindungan lingkungan tidak hanya dimasukkan dalam kebijakan, tetapi juga secara aktif ditegakkan dan diprioritaskan dalam inti pengambilan keputusan. Selain itu, implementasi EPI dipengaruhi oleh faktor normatif, faktor organisasional, dan faktor prosedural. Faktor normatif mencakup komitmen politik dan dukungan terhadap seluruh perpaduan kebijakan lingkungan. Faktor organisasional berhubungan dengan struktur kelembagaan dan kerja sama antar sektor dalam pemerintahan. Sementara itu, faktor prosedural mencakup mekanisme dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Ketiga faktor tersebut berperan dalam menentukan sejauh mana EPI dapat diimplementasikan dalam sistem kebijakan sebuah negara. Dalam skripsi ini, konsep EPI digunakan untuk menganalisis perubahan kebijakan lingkungan Brasil selama pemerintahan Jair Bolsonaro dan Luiz Inácio Lula da Silva. Melalui konsep EPI, skripsi ini berfokus pada analisis tingkat integrasi kebijakan lingkungan, khususnya dalam melihat transisi dari *weak EPI* menuju *strong EPI* dalam pengelolaan deforestasi di Hutan Hujan Amazon dan komitmen terhadap *Paris Agreement*.

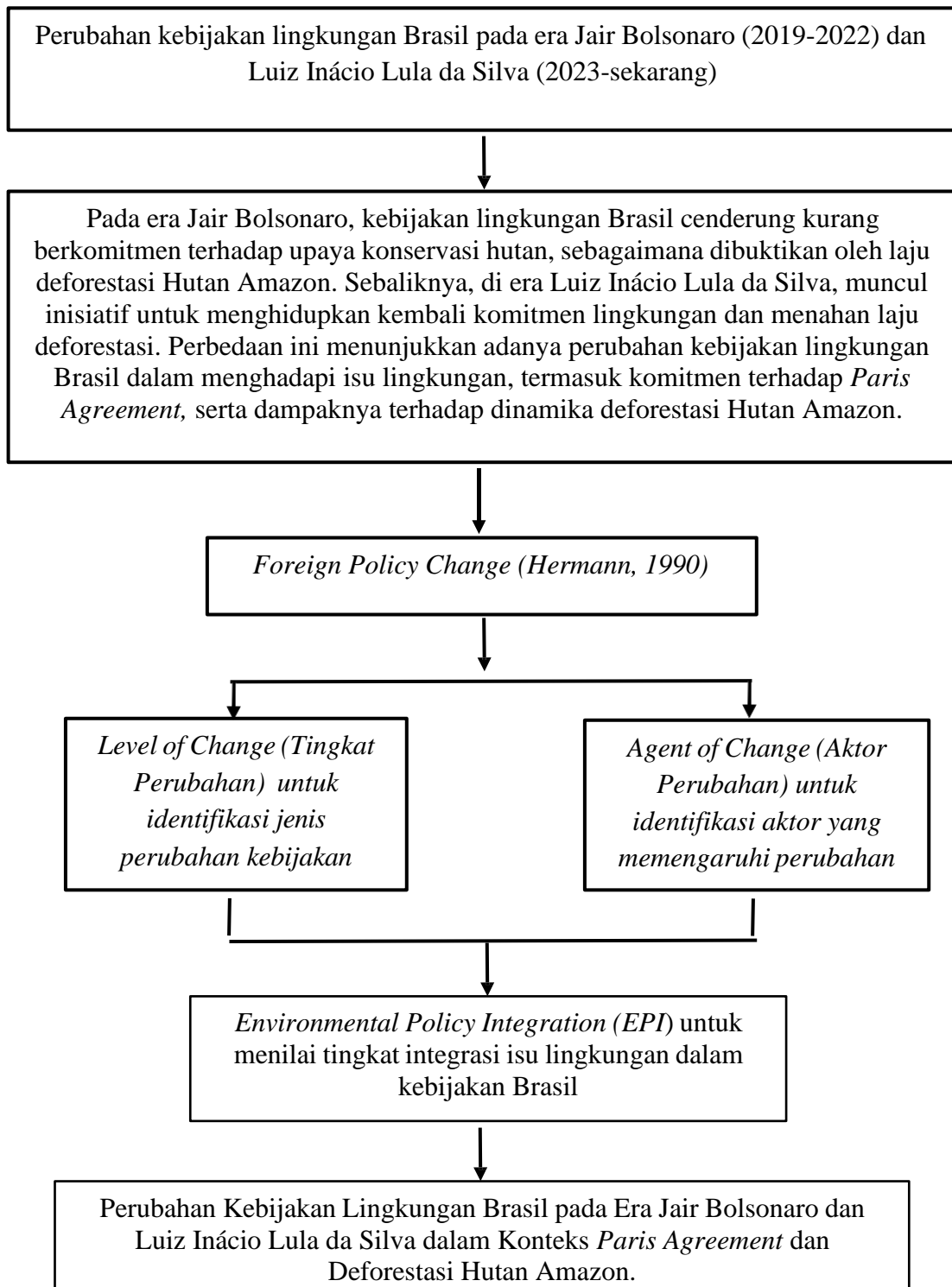
2.3 Kerangka Pemikiran

Brasil dipilih sebagai studi kasus karena memiliki kawasan Hutan Amazon terbesar di dunia dan berperan strategis dalam isu perubahan iklim global. Selain itu, Brasil secara historis dikenal sebagai *Frontrunner Country* (negara peolopor) dalam kebijakan lingkungan, khususnya di era pemerintahan Fernando Collor de Mello. Tetapi, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kebijakan lingkungan antara era pemerintahan Jair Bolsonaro (2019-2022) dan Luiz Inácio Lula da Silva

(2023-sekarang), yang mengindikasikan kemungkinan perubahan arah kebijakan lingkungan.

Dalam skripsi ini, perubahan kebijakan lingkungan Brasil dianalisis menggunakan teori *Foreign Policy Change* dari Charles F. Hermann (1990). Transisi pemerintahan dilihat sebagai kondisi yang berpotensi mendorong perubahan kebijakan, yang kemudian akan dianalisis untuk mengidentifikasi jenis perubahan kebijakan: *adjustment, program, & problem/goal change* dan aktor yang mendorong perubahan: kepemimpinan, dinamika birokrasi, perubahan struktur politik & faktor eksternal. Untuk memahami perubahan kebijakan tersebut, skripsi ini menggunakan konsep *Environmental Policy Integration (EPI)*. Konsep ini digunakan untuk menilai sejauh mana isu lingkungan diintegrasikan ke dalam kebijakan pada masing-masing era pemerintahan. Selain itu, konsep ini juga digunakan sebagai alat analisis untuk mengevaluasi tingkat integrasi kebijakan lingkungan Brasil dalam dua periode pemerintahan.

Kemudian, *Paris Agreement* diposisikan sebagai konteks internasional yang menjadi arena kebijakan, bukan menjadi faktor normatif utama. Komitmen Brasil terhadap perjanjian tersebut digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat perubahan prioritas kebijakan lingkungan antara dua periode pemerintahan. Dengan demikian, perubahan kebijakan Brasil tidak hanya dianalisis pada level domestik, tetapi juga dalam kaitannya dengan posisi Brasil dalam tata kelola perubahan iklim global. Selain itu, komitmen terhadap *Paris Agreement* juga dapat digunakan sebagai indikator untuk memahami bagaimana kebijakan lingkungan diimplementasikan ke dalam konteks global. Dengan demikian, perubahan kebijakan lingkungan tersebut dapat dianalisis dampaknya terhadap tingkat deforestasi di Hutan Amazon sebagai indikator empiris. Akhirnya, alur kerangka pemikiran skripsi ini secara runtut bergerak dari identifikasi perubahan kebijakan, menuju analisis jenis dan aktor perubahan berdasarkan teori *Foreign Policy Change* (1990), kemudian dievaluasi melalui konsep *Environmental Policy Integration (EPI)* dalam konteks *Paris Agreement* serta dampaknya terhadap deforestasi Hutan Amazon.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber: diolah oleh peneliti

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada perubahan kebijakan lingkungan Brasil era Jair Bolsonaro dan Luiz Inácio Lula da Silva dalam konteks *Paris Agreement* dan deforestasi Amazon. Metode kualitatif digunakan untuk menyelidiki mengapa dan bagaimana suatu pengambilan keputusan dilakukan (Loyola Marymount University, 2025). Metode kualitatif menyediakan alat untuk menggali seluk beluk perilaku dan interaksi manusia, misalnya keyakinan, persepsi, maupun tindakan, sehingga mampu menangkap kedalaman dan keluasan fenomena sosial. Nilai utama penelitian kualitatif berada pada kemampuannya menghasilkan wawasan yang kaya dengan pendekatan yang berpusat pada manusia. Dalam studi Lim (2025) tentang *What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines*, dinyatakan bahwa fenomena sosial terus berkembang di bawah pengaruh faktor politik, lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi, dan hukum. Dengan fokusnya pada konteks manusia, penelitian kualitatif mampu memberikan wawasan yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan.

Metode kualitatif digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan wawasan mendalam serta memahami suatu fenomena yang kompleks, sehingga dapat membuat peneliti terhubung dengan pengalaman subjektif dari subjek yang diteliti (Lim, 2025). Metode kualitatif memungkinkan pemahaman tanpa memanipulasi variabel melalui pengumpulan dan analisis data non-angka seperti observasi dan dokumen resmi. Pilihan ini sejalan dengan penelitian yang tidak berfokus pada angka statistik, melainkan pada pemahaman yang mendalam terkait perubahan kebijakan luar negeri Brasil pada era Jair Bolsonaro dan Luiz Inácio Lula da Silva. Menggunakan kerangka *Foreign Policy Change* dari Hermann

(1990), skripsi ini menganalisis perbedaan tujuan serta arah kebijakan lingkungan Brasil, sekaligus implikasinya terhadap tingkat deforestasi Hutan Amazon.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian terletak pada perubahan kebijakan luar negeri Brasil dalam isu lingkungan global, khususnya dalam konteks *Paris Agreement* dan dampaknya terhadap deforestasi Hutan Amazon pada dua era pemerintahan, yaitu Jair Bolsonaro (2019-2022) dan Lula da Silva (2023-sekarang). Fokus ini dipilih karena Hutan Amazon memiliki peran krusial dalam isu perubahan iklim dengan 60 persen wilayahnya ada di Brasil. Menggunakan *Foreign Policy Change* (Hermann, 1990), skripsi ini menganalisis transisi tujuan dan orientasi kebijakan lingkungan Brasil antar dua periode kepemimpinan serta implikasinya terhadap peningkatan deforestasi Hutan Amazon. Lokasi penelitian mencakup seluruh kawasan hutan hujan tropis Amazon di Brasil. Negara-negara lain yang dilalui Hutan Amazon tidak menjadi fokus penelitian karena cakupannya tidak sebesar Brasil, serta tidak berkaitan dengan rumusan masalah yang berfokus terhadap perubahan kebijakan luar negeri Brasil.

3.3 Teknik dan Jenis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Informasi secara keseluruhan diperoleh melalui dokumen dan publikasi yang relevan dengan perubahan kebijakan luar negeri Brasil dalam isu lingkungan global, khususnya dalam konteks *Paris Agreement* serta dampaknya terhadap deforestasi Hutan Amazon. Dokumen utama yang dianalisis meliputi laporan NDC Brasil, data deforestasi Amazon yang dipublikasikan oleh INPE, publikasi kebijakan lingkungan yang diterbitkan pada masa kepemimpinan Bolsonaro dan Lula, serta pernyataan resmi Brasil yang tertuang dalam forum internasional. Publikasi lembaga lingkungan dunia, laporan NGO lingkungan, laporan media yang kredibel, dan artikel akademik juga digunakan untuk memperkaya data penelitian. Dokumen dan publikasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi perubahan dan orientasi kebijakan lingkungan antar periode pemerintahan Jair Bolsonaro dan Luiz Inácio Lula da Silva, serta untuk menelaah faktor-faktor yang memicu perubahan

tersebut. Analisis dokumen memungkinkan peneliti dapat menelusuri evolusi gagasan, pendapat, dan peristiwa dari waktu ke waktu untuk memahami masa kini berdasarkan masa lalu. Studi dokumen dipilih karena dapat digunakan peneliti untuk menelusuri makna, interpretasi, serta evolusi kebijakan terekam secara historis tanpa bergantung terhadap wawancara secara langsung.

Penggunaan dokumen dan publikasi yang beragam bertujuan untuk memastikan metode triangulasi sumber sekunder dijalankan dengan baik. Triangulasi sendiri merupakan teknik penelitian yang dijalankan dengan memanfaatkan lebih dari satu sumber untuk memastikan kredibilitas penelitian. Salah satu kelemahan penelitian kualitatif adalah sifatnya yang subjektif, sehingga hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh pendapat atau perasaan peneliti itu sendiri. Maka dengan itu, melalui teknik triangulasi, peneliti dapat membuat jurnal reflektif (catatan pribadi untuk mengelola bias atau perasaan peneliti selama penelitian berlangsung) agar bias pribadi dapat dikontrol, validitas dapat diperkuat melalui diskusi dengan rekan sejawat (peer debriefing), dan mengecek ulang temuan, serta memanfaatkan penyajian data yang rinci dan mendalam untuk membantu memberikan konteks hingga temuan dapat dinilai relevansinya di beragam situasi (Lim, 2025).

Terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan dari teknik pengumpulan data yang dipilih, yakni: data arsip berpotensi bias karena disusun oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu; data arsip kemungkinan tidak mewakili keseluruhan cakupan informasi dan menciptakan bagian penting yang terlewat; dan data arsip bersifat statis karena hanya memberikan gambaran sejarah (Lim, 2025). Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Lim (2025) memberikan solusi, yakni peneliti harus memeriksa ulang keakuratan temuan dengan membandingkan berbagai sumber, memperhatikan peluang bias dari penulis sumber, dan menguatkannya menggunakan data lain menggunakan metode yang berbeda.

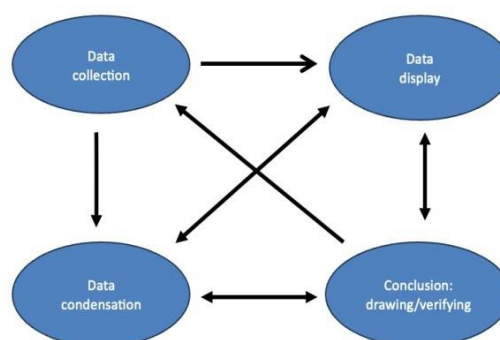
3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles & Huberman (2014) yang mencakup:

1. Kondensasi Data. Kondensasi data adalah proses menyederhanakan, menyaring, dan memfokuskan data agar lebih mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki banyak data seperti catatan lapangan, hasil wawancara, atau dokumen, sehingga perlu dipilih mana yang paling relevan dan penting. Proses kondensasi berlangsung dari awal hingga akhir penelitian, mulai dari menentukan teori dan pertanyaan penelitian, hingga mencari tema dan menulis hasil analisis. Karena skripsi ini berfokus pada perubahan kebijakan lingkungan Brasil khususnya dalam konteks Perjanjian Paris dan deforestasi Hutan Amazon pada kepemimpinan Jair Bolsonaro dan Luiz Inácio Lula da Silva, peneliti memilih data yang paling sesuai, seperti dokumen kebijakan resmi, pernyataan pemerintah Brasil, regulasi, dan data deforestasi. Melalui proses kondensasi data, penulis merapikan dan memfokuskan informasi untuk mengidentifikasi pola perubahan kebijakan antar dua pemerintahan. Analisis ditujukan untuk melihat transisi tujuan, arah kebijakan, dan langkah-langkah yang digunakan pemerintah dalam menghadapi isu lingkungan global, seperti implementasi komitmen dalam Perjanjian Paris yang berkaitan dengan isu pelestarian hutan. Tujuan kondensasi bukan untuk mengurangi isi data, tetapi untuk memperjelas temuan penelitian sehingga analisis tetap berfokus pada identifikasi agen perubahan dan tingkat perubahan kebijakan seperti yang dirumuskan dalam *Foreign Policy Change*.
2. Data display adalah tahap kedua, yaitu proses menampilkan data secara teratur dan ringkas agar mudah dipahami. Data display dapat berupa tabel, bagan, atau matriks yang membantu peneliti melihat hubungan dalam data. Dengan menampilkan data dalam bentuk visual, peneliti bisa lebih cepat memahami apa yang terjadi dan menentukan langkah selanjutnya dalam analisis. Dalam penelitian ini, data display dapat digunakan untuk menampilkan hasil analisis secara visual agar mudah dipahami. Contohnya, peneliti dapat menyusun tabel perbandingan kebijakan lingkungan era Jair Bolsonaro dan Luiz Inácio Lula da Silva dengan menyoroti perubahan dan arah kebijakan dalam konteks *Paris Agreement*. Peneliti juga dapat menampilkan grafik tren deforestasi di Hutan Amazon selama dua periode pemerintahan untuk melihat apakah ada perubahan besar setelah pergantian presiden. Data yang awalnya berupa teks dan dokumen

panjang dapat diubah menjadi bentuk yang lebih ringkas dan jelas agar memudahkan identifikasi agen perubahan dan tingkat perubahan sebagaimana diklasifikasikan dalam teori *Foreign Policy Change*. Tampilan seperti tabel atau grafik dapat membantu peneliti melihat hubungan antara perubahan kebijakan luar negeri Brasil dan implikasinya terhadap deforestasi, bukan hanya pada tingkat kepatuhan terhadap *Paris Agreement*.

3. Verifikasi atau Kesimpulan adalah tahap saat peneliti menarik dan memeriksa kembali kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Proses ini dimulai saat awal penelitian, sejak peneliti mulai melihat pola atau hubungan dalam data, lalu semakin jelas seiring analisis dilakukan. Kesimpulan kemudian diverifikasi dengan cara memeriksa ulang catatan dan membandingkan berbagai sumber. Misalnya, dalam penelitian terkait perubahan kebijakan Brasil dalam isu lingkungan pada era kepemimpinan Jair Bolsonaro dan Luiz Inácio Lula da Silva, peneliti dapat menemukan petunjuk bahwa kebijakan lingkungan pada era Luiz Inácio Lula da Silva lebih mendukung perlindungan hutan dibandingkan era Jair Bolsonaro. Tetapi, sebelum mencapai kesimpulan, peneliti harus memverifikasi temuan tersebut dengan membandingkan berbagai sumber data, seperti dokumen resmi negara, peraturan dan kebijakan yang diterapkan, laporan lembaga lingkungan, dan pemberitaan media internasional. Verifikasi ini krusial untuk memvalidasi bahwa perubahan yang diidentifikasi benar-benar menunjukkan transisi tujuan dan orientasi kebijakan sebagaimana dirumuskan dalam *Foreign Policy Change*.



Gambar 3.1 Model Miles dan Huberman.

Sumber: *qualitative data analysis: a methods sourcebook edition 3* .

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan signifikan dalam kebijakan lingkungan Brasil antara era Jair Bolsonaro dan Luiz Inácio Lula da Silva dalam konteks komitmen terhadap Paris Agreement dan pengendalian deforestasi Hutan Amazon. Perubahan tersebut terlihat dalam aspek utama: restrukturisasi kelembagaan lingkungan, kapasitas penegakan dan regulasi, tata kelola masyarakat adat, dan strategi pengendalian deforestasi maupun kebijakan iklim. Skripsi ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan yang berbanding terbalik antara kedua periode pemerintahan tersebut.

Pada era pemerintahan Jair Bolsonaro, kebijakan lingkungan cenderung mengarah pada pelemahan kapasitas kelembagaan, deregulasi, dan penurunan ambisi kebijakan iklim. Hal ini ditunjukkan dari restrukturisasi lembaga yang mengurangi fungsi pengawasan lingkungan, pemotongan anggaran dan sumber daya manusia, pelemahan perlindungan wilayah adat, dan penghentian strategi pengendalian deforestasi yang sebelumnya aktif. Selain itu, deregulasi melalui instrumen infra-legal dan pelemahan mekanisme kerja sama antar sektor menunjukkan adanya transisi orientasi kebijakan dari perlindungan lingkungan menuju kepentingan agribisnis dan ekstraksi sumber daya alam. Dalam konteks tata kelola masyarakat adat, kebijakan yang dilakukan cenderung melemahkan perlindungan hak-hak masyarakat adat, salah satunya melalui pembukaan wilayah adat terhadap aktivitas ekonomi dan pelemahan partisipatif.

Dalam aspek strategi pengendalian deforestasi Hutan Amazon dan komitmen iklim, pemerintahan di era Jair Bolsonaro menunjukkan pengurangan ambisi kebijakan lingkungan. Penghentian PPCDAm sebagai strategi utama pengendalian deforestasi, revisi NDC (*Nationally Determined Contributions*)

yang menurunkan ambisi dan kurangnya partisipasi aktor lain dalam proses kebijakan menunjukkan lemahnya integrasi kebijakan lingkungan. Situasi tersebut berimplikasi terhadap peningkatan deforestasi Hutan Amazon selama periode pemerintahan Jair Bolsonaro.

Sementara itu, pada era pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva, kebijakan lingkungan memperlihatkan arah yang berlawanan, yakni penguatan kembali kapasitas kelembagaan, peningkatan anggaran dan penegakan hukum, penguatan perlindungan masyarakat adat, dan reaktivasi PPCDAm serta penyesuaian target iklim yang lebih ambisius. Selain itu, dalam aspek penegakan hukum, terjadi peningkatan dalam pengawasan maupun pemberian sanksi terhadap pelanggar lingkungan. Kebijakan pengelolaan masyarakat adat juga menunjukkan transisi menuju penguatan hak partisipatif masyarakat, demarkasi wilayah adat, dan perlindungan hukum terhadap wilayah tersebut.

Dalam pengendalian deforestasi Hutan Amazon dan kebijakan iklim, pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva kembali mengaktifkan PPCDAm, menetapkan target nol deforestasi pada 2030, dan meningkatkan ambisi kebijakan iklim melalui NDC yang lebih sejalan dengan komitmen global. Kerja sama antar sektor yang diperkuat serta peningkatan integrasi kebijakan lingkungan menunjukkan pendekatan yang lebih terstruktur. Perubahan tersebut berkontribusi terhadap penurunan deforestasi Hutan Amazon pada periode pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva.

Berdasarkan kerangka Charles F.Hermann (1990), perubahan kebijakan ini dikategorikan sebagai *problem/goal change* karena menunjukkan transisi prioritas kebijakan dari yang sebelumnya berorientasi pada ekspansi ekonomi dan agribisnis menjadi prioritas perlindungan lingkungan dan komitmen iklim. Dari sisi agen perubahan, dinamika ini dipengaruhi oleh perubahan konfigurasi kekuatan politik domestik (*domestic restructuring*), yang memicu pergeseran arah kebijakan pada tingkat nasional. Perubahan kepemimpinan politik menghasilkan pergeseran dalam prioritas kebijakan, kelembagaan, dan hubungan antara negara dan aktor non-negara. Sehingga, perubahan ini tidak hanya dalam tataran teknis atau administratif, tetapi menunjukkan perubahan orientasi kebijakan negara secara keseluruhan.

Sementara itu, berdasarkan konsep Environmental Policy Integration (EPI), kebijakan pada era pemerintahan Jair Bolsonaro menunjukkan tingkat integrasi lingkungan yang lemah (*weak EPI*), sementara pada era pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva mengarah pada peningkatan integrasi isu lingkungan dalam kebijakan publik (*strong EPI*). Dengan demikian, perubahan kebijakan lingkungan Brasil tidak hanya menunjukkan perubahan administratif, tetapi juga perubahan dalam orientasi pembangunan negara terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Perubahan kebijakan lingkungan membawa implikasi terhadap tingkat deforestasi Hutan Amazon. Arah kebijakan yang melemahkan kapasitas lembaga lingkungan dan komitmennya cenderung meningkatkan deforestasi, sementara penguatan kebijakan dan komitmen lingkungan berkontribusi pada penurunan deforestasi di Hutan Amazon.

5.2 Saran

Berdasarkan skripsi ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Secara akademis, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan lingkungan, khususnya dengan menggunakan peran aktor non-negara seperti organisasi masyarakat, swasta, dan advokasi transnasional. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan pendekatan komparatif dengan membandingkan Brasil dan negara-negara pemilik hutan hujan tropis lainnya di dunia, seperti Republik Demokratik Kongo dan Indonesia untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait dinamika kebijakan lingkungan di negara berkembang, di mana masalah ekonomi dan lingkungan masih memiliki hambatan.

Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan longitudinal untuk menelaah keberlanjutan kebijakan lingkungan dalam jangka panjang, misalnya untuk mengevaluasi konsistensi pengaplikasian kebijakan dan dampaknya terhadap lingkungan. Pendekatan ini berguna untuk melihat apakah perubahan kebijakan yang terjadi bersifat sementara atau berkelanjutan. Selain itu, saran terhadap pemerintah Brasil adalah agar dapat mempertahankan sekaligus memperkuat kebijakan lingkungan yang memprioritaskan keberlanjutan,

khususnya dalam pengendalian deforestasi Hutan Amazon serta komitmen terhadap *Paris Agreement*. Penguatan kapasitas lembaga lingkungan, peningkatan kerja sama antar sektor, dan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan kebijakan perlu untuk terus ditingkatkan. Pemerintah juga perlu menjaga konsistensi kebijakan lingkungan dalam jangka panjang sehingga perubahan kebijakan yang terjadi karena dinamika pemilihan umum tidak mengganggu kebijakan yang sudah tepat dalam skala nasional maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- AFP. (2023, January 7). *Brazilian Amazon deforestation up 150% in Bolsonaro's last month*. Aljazeera.
- Agencies, N. (2018, November 28). *Brazil withdraws offer to host UN conference on climate change*. Aljazeera.
- Amazon Fund. (2013). *Amazon Fund Project Document*. https://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/en/.galleries/documentos/amazon-fund/Amazon-Fund-Project_Document_MMA.pdf
- Angelo, C. (2022a). *Bolsonaro ends government with 60% increase in Amazon deforestation*. <https://www.oc.eco.br/en/bolsonaro-ends-government-with-60-increase-in-amazon-deforestation/>
- Angelo, C. (2022b, April 7). *Brazil continues to violate Paris Agreement with new climate target*. Observatório Do Clima. <https://oc.eco.br/en/brazil-continues-to-violate-paris-agreement-with-new-climate-target/>
- Assunção, J., & Gandour, C. (2019). *Resumo Para Política Pública o Brasil Sabe Como Deter o Desmatamento Na Amazônia Monitoramento e Fiscalização Funcionam e Devem Ser Fortalecidos*. <http://www.inputbrasil.org/publicacoes/o-brasil-sabe-como-deter-o-desmatamento-na-amazonia/>
- Bataier, C. (2024, December 5). *President Lula signs the recognition of three Indigenous lands in Brazil. Brasil de Fato: Uma Visão Popular Do Brasil e Do Mundo*. <https://www.brasildefato.com.br/2024/12/05/president-lula-signs-the-recognition-of-three-indigenous-lands-in-brazil/>
- Bersch, K., & Lotta, G. (2024). *Political Control and Bureaucratic Resistance: The Case of Environmental Agencies in Brazil*. *Latin American Politics and Society*, 66(1), 27–50. <https://doi.org/10.1017/lap.2023.22>
- Bispo, F., & InfoAmazonia. (2022, October 18). *Activists slam Bolsonaro rule change seen as ending demarcation of Indigenous lands*. Mongabay. <https://news.mongabay.com/2022/10/activists-slam-bolsonaro-rule-change-seen-as-ending-demarcation-of-indigenous-lands/>
- Branford, S., & Borges, T. (2021, February 1). *Brazil guts agencies, "sabotaging environmental protection" in Amazon: Report*. Mongabay.

<https://news.mongabay.com/2021/02/brazil-guts-agencies-sabotaging-environmental-protection-in-amazon-report/>

- Brazilian Report. (2023, January 19). *The Return of the Amazon Fund and Lula's Race to Cut Deforestation*. Wilson Center. <https://www.wilsoncenter.org/article/return-amazon-fund-and-lulas-race-cut-deforestation#:~:text=After%20a%20bemusing%20suspension%20under,sponsored%20projects%2C%20and%20providing%20accountability>
- Bryce, E. (2023, February 20). *Why Is the Amazon So Important for Climate Change?* Scientific American. <https://www.scientificamerican.com/article/why-is-the-amazon-so-important-for-climate-change1/>
- BSS. (2025a, November 18). *Brazil defines boundaries for 10 new indigenous territories*. BSS News: Online Portal of Bangladesh Sangbad Sangstha. <https://www.bssnews.net/international/332999>
- BSS. (2025b, December 10). *Brazil moves closer to curbing Indigenous land claims in constituion*. BSS NEWS: Online Portal of Bangladesh Sangbad Sangstha. <https://www.bssnews.net/international/340554#:~:text=The%20Senate%20advanced%20Tuesday%20a,threats%20like%20deforestation%20and%20fires>.
- Butler, R. A. (2025, October 30). *Heading into COP, Brazil's Amazon deforestation rate is falling. What about fires?* Mongabay. <https://news.mongabay.com/2025/10/heading-into-cop-brazils-amazon-deforestation-rate-is-falling-what-about-fires/>
- Catanoso, J. (2021, November 3). *COP26 Glasgow Declaration: Salvation or threat to Earth's forests?* Mongabay. <https://news.mongabay.com/2021/11/cop26-glasgow-declaration-salvation-or-threat-to-earths-forests/>
- Chagas, R. (2025, November 25). *After hitting record low under Bolsonaro, Brazil's enviromental budget quadruples under Lula*. BrasildeFacto.
- Chasek, P. S. ., Downie, D. Leonard., & Brown, J. Welsh. (2018). *Global Environmental Politics*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Climate Action Tracker. (2020). *CAT Climate Target Update Tracker Brazil*. <https://climateactiontracker.org/climate-target-update-tracker/brazil/>
- Coalition for Rainforest Nations. (2025). *The Paris Agreement & UNFCCC REDD+*. Rainforest Coalition. <https://www.rainforestcoalition.org/the-paris-agreement-unfccc-redd/>

- Coelho, G. (2019). *Câmara aprova MP que tira Coaf do Ministério da Justiça e reestrutura ministérios*. <https://www.conjur.com.br/2019-mai-22/camara-aprova-mp-tira-coaf-justica-reestrutura-ministerios/>
- Council of Foreign Relations. (n.d.). *Deforestation in the Amazon*. Retrieved September 29, 2025, from <https://share.google/wDq8o01vrwOTPdysp>
- Deutsch, S. (2021). *Populist authoritarian neoliberalism in Brazil: making sense of Bolsonaro's anti-environment agenda*. <https://orcid.org/0000-0002-6659-6092>.
- Eisele, I. (2022). *How has the rainforest fared under Bolsonaro?* <https://www.dw.com/en/how-has-the-amazon-rainforest-changed-under-jair-bolsonaro/a-63211783>
- Fakebook.eco. (2020, August 19). *O Brasil tem um plano de combate ao desmatamento?* Fakebook.Eco. <https://fakebook.eco.br/o-brasil-tem-um-plano-de-combate-ao-desmatamento/>
- Franchini, M., Carolina, A., Mauad, E., & Viola, E. (2020). *De Lula A Bolsonaro: Uma Década De Degradación De La Gobernanza Climática En Brasil*.
- Global Compliance News. (2023). *Brazil: Five federal decrees on climate change enacted*. https://www.globalcompliancencnews.com/2023/06/30/https-insightplus-bakermckenzie-com-bm-environment-climate-change_1-brazil-five-federal-decrees-on-climate-change-enacted-by-the-federal-government_06232023/
- Gonzaga, D. (2022). *Bolsonaro is a catastrophe for the environment*. <https://www.greenpeace.org/international/story/52098/bolsonaro-president-brazil-amazon-environment/>
- Gonzales, J. (2018, November 12). *Merger of Brazil's agriculture and environment ministries in limbo*. Mongabay. <https://news.mongabay.com/2018/11/bolsonaro-merger-of-brazil-agriculture-and-environment-ministries-in-limbo/>
- Greene, Jim, & MFA. (2024). *Tropical ecosystems*. <https://www.ebsco.com//research-starters/environmental-sciences/tropical-ecosystem>
- Greenpeace. (2025). *Brazil and the Amazon Forest*. <https://www.Greenpeace.Org/Usa/Forests/Brazil-and-the-Amazon-Forest/>. <https://www.greenpeace.org/usa/forests/brazil-and-the-amazon-forest/>
- Hermann, C. F. (1990). This content downloaded from 185.44.77.89 on Fri. In *Quarterly* (Vol. 34, Number 1).
- Huaxia. (2023, September 21). *Brazil to return to climate ambition at Paris Agreement level: president*. XinhuaNet.

- Human Rights Watch. (2021). *COP26: Don't Be Fooled by Bolsonaro's Pledges*.
- Husna, N., Rosyidin, M., Sos, S., Alfian, M. F., & Ip, S. (2022). *Dilema Prioritas: Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Brasil Era Bolsonaro dalam Isu Lingkungan Global*. In *Journal of International Relations* (Vol. 8). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jih><http://www.fisip.undip.ac.id>
- IESR: Institute for Essential Services Reform. (2016, October 5). *Indonesia dan Ratifikasi Paris Agreement: Di Manakah Kita?* IESR. <https://iesr.or.id/indonesia-dan-ratifikasi-paris-agreement-di-manakah-kita/>
- InfoAmazonia. (2021). *Deforestation in the Legal Amazon grows 22% in 2021, reaching the highest rate in 15 years*. <https://infoamazonia.org/en/2021/11/19/deforestation-amazon-grows-22-in-2021/>
- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). (2024). *Deforestation in legal Amazon: increments dashboard*. https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/legal_amazon/increments
- International Labour Organization. (2024). *C169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No.169)*. In International Labour Organization. https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
- Jackson, R., & Sørensen, G. (2013). *Introduction to International Relations* (Fifth).
- Jordan, A., & Lenschow, A. (2010). *Policy paper environmental policy integration: A state of the art review*. In *Environmental Policy and Governance* (Vol. 20, Number 3, pp. 147–158).
- Journals Inc, G. (2023). *Global Journal of Human Social Science*. <https://doi.org/10.17406/GJHSS>
- Kara Anderson. (2024, July 30). *The Complex Role of the Amazon Rainforest*. <https://Greenly.Earth/En-Gb/Blog/Ecology-News/the-Complex-Role-of-the-Amazon-Rainforest>. <https://greenly.earth/en-gb/blog/ecology-news/the-complex-role-of-the-amazon-rainforest>
- King's College London. (2021, November 1). *Brazil and climate diplomacy*. <https://www.kcl.ac.uk/Brazil-and-Climate-Diplomacy>
- Kossoy, Alexandre. (2018, October). *No mystery: What is Brazil doing to address climate change?* <https://blogs.worldbank.org/en/latinamerica/no-mystery-what-brazil-doing-address-climate-change>
- Kruid, S., Walker, W., Castanho, A., R.Gorelik, S., T.Coe, M., N. Macendo, M., Moutinho, P., Alencar, A., M. Brando, P., & Baccini, A. (2021, July 27).

Beyond Deforestation: Carbon Emission From Land Grabbing and Forest Degradation in the Brazilian Amazon. Frontiers.

- Lapola, D. M., Pinho, P., & Walker, W. S. (2023). *The drivers and impacts of Amazon forest degradation.* <https://www.science.org/doi/10.1126/science.abp8622>
- Lei N° 13.844, de 18 de Junho de 2019, Diário Oficial da União (2019). <http://www.in.gov.br/autenticidade.html,peilocódigo06002019061800004>
- Lim, W. M. (2025). *What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines.* *Australasian Marketing Journal*, 33(2), 199–229. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Loyola Marymount University. (2025). *Qualitative Research and Approaches.* <https://academics.lmu.edu/irb/qualitative-research-and-approaches/>
- Luhn, A. (2022, November 17). *COP27: “Brazil is back” to fight deforestation, Lula says, but hurdles await.* Mongabay.
- Mendes, K. (2023, January 4). *President Lula’s first pro-environment acts protect Indigenous people and the Amazon.* Mongabay.
- Mendonça, E. (2019, September 22). *Bolsonaro’s Brazil unlikely to achieve Paris Agreement goals: experts.* Mongabay.
- Menezes, R. G., & Barbosa, R. (2021). *Environmental governance under Bolsonaro: dismantling institutions, curtailing participation, delegitimising opposition.* *Zeitschrift Fur Vergleichende Politikwissenschaft*, 15(2), 229–247.
- Min, Z., Yulu, D., Xiaolu, L., & de Castro, D. (2025). *Brazil’s legal and policy framework for combating Amazon deforestation.* *Trees, Forests and People*, 22. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2025.101065>
- Ministério do Meio Ambiente (MMA). (2023). *Action Plan for the Prevention and Control of Deforestation in the Legal Amazon (PPCDAm) Fifth phase (2023-2027) (Fifth Phase).*
- Montoya, M. (2021, January 27). *Brazilian indigenous leaders urge the International Criminal Court to investigate President Jair Bolsonaro over destruction of the Amazon.* Universal Rights Group. <https://www.universal-rights.org/brazilian-indigenous-leaders-urge-the-international-criminal-court-to-investigate-president-jair-bolsonaro-over-destruction-of-the-amazon/>
- Mourão, J., Sessim, M., & Souza, P. (2023, September 12). *Preserving the Amazon: Strategies to Reduce Deforestation in Rural Settlements.* Climate Policy Initiative.

https://www.climatepolicyinitiative.org/id/publication/preserving-the-amazon-strategies-to-reduce-deforestation-in-rural-settlements/#_ftn15

- National Geographic. (2026). *Deforestation*. National Geographic: Education.
- Observatório do Clima. (2019). *The Worst Is Yet To Come A year of environmental havoc under Brazil's far-right President Jair Bolsonaro*. <https://news.mongabay.com/2018/10/fate-of-the-amazon-is-on-the-ballot-in-brazils-presidential-election-commentary/>
- Paulo, S. (2016). *The Paris Agreement And The Future Of Land Use In Brazil Policy Brief*.
- Pereira, de A. L. E. J., Silveira Ferreira, P. J., de Santana Ribeiro, L. C., Sabadini Carvalho, T., & de Barros Pereira, H. B. (2019). *Policy in Brazil (2016–2019) threaten conservation of the Amazon rainforest*. *Environmental Science and Policy*, 100, 8–12. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.06.001>
- Pires, F. L. (2025). *The Legal Profession in the Executive Branch: Lesson from Brazil*. In *Verfassungsblog: On Matters Constitucionais*. <https://verfassungsblog.de/the-legal-profession-in-the-executive-branch/>
- Presidência da República. (2025). *In 2025, deforestation fell by 11.08 percent in the Amazon and by 11.49 percent in the Cerrado*. <https://www.gov.br/secom/en/latest-news/2025/10/in-2025-deforestation-fell-by-11-08-percent-in-the-amazon-and-by-11-49-percent-in-the-cerrado>
- Proksch, J. (2025). *Bolsonaro and Lula: A Comparative Study of Climate Policy in Brazil*. *The Grimshaw Review of International Affairs*, 2(1), 343–357. <https://grimshawreview.lse.ac.uk/articles/24>
- Reuters. (2024, June 12). *Brazil's Lula Recognizes Three More Indigenous Territories*. ICTJ: Justice Truth Dignity. <https://www.ictj.org/latest-news/brazils-lula-recognizes-three-more-indigenous-territories#:~:text=Share-,Share,Institutional%20Reform>
- Roy, D. (2022, August 24). *Deforestation of Brazil's Amazon Has Reached a Record High. What's Being Done?* <https://www.cfr.org/in-brief/deforestation-brazils-amazon-has-reached-record-high-whats-being-done>
- Schepers, E. (2019, August 26). *Bolsonaro: I'll save Amazon rainforest by giving it to corporations*. <https://www.peoplesworld.org/article/bolsonaro-government-says-it-will-save-amazon-by-opening-it-to-corporate-interests/>
- Sordi, J. (2022, October 7). *Brazil may fail Paris Agreement targets by 137% if Bolsonaro stays in office*. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2022/10/brazil-may-fail-paris-agreement-targets-by-137-if-bolsonaro-keeps-in-office/>

- Spring, J. (2023, February 2). *Insight: Lula's Amazon pledge looks distant as Brazil battles deforestation*. Reuters.
- Spring, J., & Bloadle, A. (2021, November 19). *Brazil's Amazon deforestation surges to 15-year high, undercutting government pledge*. Reuters .
- The London School of Economics and Political Science. (2023, November 29). *What is the Global Stocktake?* LSE. <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-is-the-global-stocktake/>
- Trevizan, A. F., Leal, A. M. M., & Valle, V. E. N. (2025). *Forest Trade on the Amazon Frontier and Its Interaction with the EUDR*. *International Journal for the Semiotics of Law*, 38(5), 1639–1662. <https://doi.org/10.1007/s11196-025-10250-7>
- UFRJ. (2025, August). *Modeling The Impacts of Brazil's Ecological Transformation Plan*. <https://admin.un-page.org/wp-content/uploads/2025/08/executive-summary-page-brazil-eng.pdf>
- United Nations. (1997). *United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 June 1992*. <https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992>.
- Vilani, R. M., Ferrante, L., & Fearnside, P. M. (2023). *The first acts of Brazil's new president: Lula's new Amazon institutionalality*. In *Environmental Conservation* (Vol. 50, Number 3, pp. 148–151). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/S0376892923000139>
- Viola, E. (2004). *The Fifteen Years Of Perspective Shifting: From The Hope Of A Cooperative And Sustainable World In 1989 To The Reality Of A Violent And Technologically Accelerated World In 2004*.
- World Resources Institute. (2021, April 23). *Statement: Brazil's 2050 Climate Neutrality Goal is an Important Gesture, but it Contradicts Climate Actions from the Administration*. World Resources Institute.
- WWF. (2022). *Living Amazon Report 2022*. 15.
- WWF.(2024). *Amazon* .WWF. <https://www.wwf.org.uk/where-we-work/amazon>
- WWF-Brazil. (2020, December 11). *New Brazilian NDC reduces the country's climate ambition, against the spirit of the Paris Agreement*. WWF.
- Yonaha, L., Salomon, M., Vergotti, M., Tanigawa, R., Stec, T., Porcel, D., Vieira, C. V., & Araújo, B. C. e R. (2024). *NDC-reaction-Talanoa-20241113*.
- Ziccardi, L., yanai, A., Fearnside, P., & Stark, S. (2024). *Deforestation in the Brazilian Amazon: Threats and opportunities*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4591425/v1>